

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBULATAN
HARGA DI MINIMARKET MURNI KECAMATAN WINONG
KABUPATEN PATI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah (Hukum Ekonomi Syariah)**



Disusun oleh:

AMBARWATI

132311058

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017

Muh. Arifin, S.Ag., M.Hum.

Perum Griya Lestari B. 3/12 Ngaliyan, Semarang.

Supangat, M.Ag

Jl. Skip Baru Rt.06 Rw.06, No.44 Kel. Sidorejo, Temanggung.

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ambarwati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ambarwati
NIM : 132311058
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Judul Skripsi : *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati*

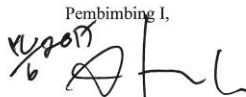
Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

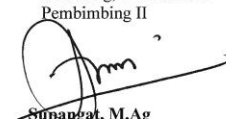
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 13 Juni 2017

Pembimbing II

Pembimbing I,


Muh.Arifin, S.Ag., M.Hum
NIP. 19711012 199703 1 002



Supangat, M.Ag
NIP. 19710402 200501 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601292
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ambarwati
NIM : 132311058
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : **Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan
Harga di Minimarket Murni Kecamatan Winong
Kabupaten Pati**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat **BAIK** pada tanggal **13 Juli 2017**.

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2017/2018 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Semarang, 24 Juli 2017

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1 004

Sekretaris Sidang

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19711012 199703 1 002

Penguji I

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 19640117 199703 1 003



Penguji II

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 19670320 199303 2 001

Pembimbing I

Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1 004

Pembimbing II

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19711012 199703 1 002

MOTTO

الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَتَّجَرُونَ تَبَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”. (Qs. An-Nisa:29)

PERSEMBAHAN

*Dengan curahan puji syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT
Dan semoga Shalawat serta Salam tetap tercurahkan kepada Nabi
Muhammad SAW*

Karya kecil ini ku persembahkan kepada:

Ibuku, Ibuku, Ibuku, dan Ayahku

*Terimakasih banya kepada Ayah tercinta (Wartono) dan Ibu tercinta (Karmisah)
berjuang dengan penuh keikhlasan, yang telah menorehkan segala kasih dan
sayangmya dengan penuh rasa ketulusan yang tak kenal lelah dan batas waktu.*

Adekku dan Segenap Keluarga Tercinta

*Adekku Fajar Cisanda dan sepupu cantikku Reva Rukmawanti, serta Keluarga
besarku, terima kasih atas segala perhatian dan dukungan yang diberikan kepada
penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.*

Sahabat-Sahabat Tersayang

*Terima kasih buat sahabat-sahabtku tersayang (Mbak iin, Itsna, Sulis, Siti, Ina,
Vreda dan temen-temen Muamalah Angkatan 2013 yang telah memberikan
semangat yang tak kenal lelah, dan tak lupa kepada teman-teman Posko 03 KKN
67 kalian adalah teman dan keluarga baruku yang selalu memberikan semangat
untuk menyelesaikan skripsi.*

*Semoga Allah SWT membalas semua dengan yang lebih baik, kebahagiaan dunia
maupun akhirat. Aamiin*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158

Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	d
9	ذ	Ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	H
28	ء	’
29	ي	Y

2.

2. Vokal Pendek

َ = a	كَتَبَ	kataba
ِ = i	سُئِلَ	su'ila
ُ = u	يَذْهَبُ	yazhabu

4. Diftong

َإِي = ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ = au	حَوْلَ	ḥaula

3. Vokal Panjang

َا... = ā	قَالَ	qāla
َاِي = ī	قِيلَ	qīla
أُو = ū	يَقُولُ	yaqūlu

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Juni 2017

Deklarator



Ambarwati
NIM. 132311058

Abstraksi

Jual beli di minimarket adalah jual beli yang dilakukan dengan cara pembeli memilih barang kemudian membawanya ke kasir untuk mengetahui jumlah harga barang yang harus dibayar. Pada saat transaksi pembayaran inilah akan terjadi pembulatan harga apabila pembeli membayar dengan uang lebih dan terdapat kembalian dengan nominal kecil seperti Rp. 50,- atau Rp. 100,-, maka nominal kecil tersebut akan dibulatkan oleh kasir.

Pokok permasalahan dari uraian diatas adalah bagaimana analisis praktek pengembalian nominal kecil dalam jual beli di minimarket Murni Kec. Winong Kab. Pati? Dan analisis hukum Islam terhadap praktek pembulatan harga di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati?

Menjawab permasalahan di atas terkait pembulatan harga di minimarket Murni Kec. Winong Kab. Pati dalam skripsi ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data skunder, setelah semua data terkumpul penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati dalam praktek pembulatan harga yang dilakukan kasir harus meminta persetujuan atau pun

menginformasikan kepada pembeli sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomer 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan. Hal ini agar tidak melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, agar unsur kerelaan itu tetap melekat dan menyertai dalam transaksi jual beli di minimarket Murni. Analisis hukum islam menunjukkan bahwa, pembulatan harga di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip muamalah yaitu tidak adanya unsur kerelaan dari sebagian pembeli, dan pembulatan harga tersebut termasuk riba (tambahan) karena harga yang disepakati dan dibayar oleh pembeli adalah harga yang tertera pada display bukan pada harga setelah dibulatkan.

Kata kunci: Pembulatan Harga, *bai' al-mu'âthâh*, *minimarket*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wasyukurilah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan iman dan islam. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang memberikan syafaatnya kepada kita semua.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi Strata 1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Pada penyusunan skripsi ini, tentulah tidak terlepas dari bantuan pihak yang terkait. Dengan itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para jajaran Rektor Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Arif Junaedi. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para jajaran Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Afif Noor S.Ag, M.Hum. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan kepada sekertaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

4. Bapak Muh. Arifin, S.Ag, M.Hum. selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing I dan Bapak Supangat, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah , Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Kepala keluarga besar Bapak Juhari dan kepada kepala Toko Minimarket Murni Winong dan semua karyawan Minimarket Murni Winong yang telah memberi izin sebagai tempat penelitian dan membantu lancarnya penelitian guna penyusunan skripsi.
7. Keluarga besar terutama Ayah dan Ibu tercinta dan adek yang selalu memberikan doa restu, semangat, perhatian, cinta dan kasih sayang.
8. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013, semoga sukses selalu menyertai kita semua.
9. Dan pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung, yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya

penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.
Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 13 Juni 2017

Ambarwati

NIM. 123311058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
HALAMAN DEKLARASI.....	viii
HALAMAN ABSTRAKSI	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian jual beli.....	19
B. Dasar hukum jual beli	24

C. Rukun dan syarat jual beli.....	32
D. Bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam.....	39
E. Bai al-Mu'âthâh	44
F. Penetapan harga (Tas'îr)	48

BAB III PRAKTEK PEMBULATAN HARGA DI MINIMARKET MURNI KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI 40

A. Gambaran umum di minimarket Murni Winong.....	54
1. Profil umum minimarket Murni	54
2. Visi dan Misi minimarket Murni.....	56
B. Sumber daya manusia (SDM), Struktur organisasi dan job description (pembagian kerja).....	57
C. Pemasaran (Marketing).....	65
D. Macam-macam produk yang diperjualbelikan	66
E. Managemen penetapan harga di minimarket Murni	67
F. Praktek pembulatan harga di minimarket Murni	68

BAB IV ANALISIS

A. Analisis Praktek Pengembalian Nominal Kecil dalam Jual Beli di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati ..	75
B. Analisis Hukum Islam terhadap Pembulatan Harga di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	96
B. Saran	97
C. Penutup	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak akan terlepas dari transaksi tukar menukar atau jual beli. Dalam jual beli misalnya, ketika kesepakatan telah dicapai, maka akan muncul hak dan kewajiban. Yakni, hak pembeli untuk menerima barang, dan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang. Atau, kewajiban pembeli untuk menyerahkan harga barang (uang), dan hak penjual untuk menerima uang¹.

Dewasa ini masyarakat semakin memudahkan untuk memilih dan membeli barang baik jasa maupun non jasa, untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan masyarakat tidak hanya bisa pergi ke pasar-pasar tradisional, akan tetapi bisa memilih untuk pergi ke pasar-pasar modern, seperti minimarket, swalayan, dan supermaket yang keberadaannya semakin menjamur.

Perbedaan antara pasar modern dengan pasar tradisional dapat dilihat dari cara transaksinya, pada pasar modern tidak bisa melakukan tawar-menawar sedangkan di pasar tradisional masih bisa melakukan tawar-menawar. Sedangkan fasilitas tidak dapat menjadi sebuah ukuran untuk menentukan tradisional atau modernnya suatu pasar. Artinya dalam sebuah pasar dengan fasilitas yang serba

¹ Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 3.

modern tetapi masih terdapat tawar-menawar maka pasar tersebut akan dikategorikan sebagai pasar tradisional².

Munculnya pasar modern sebagai tempat alternatif baru dalam berbelanja juga memberikan hal baru yang terjadi dalam transaksinya. Praktek baru dalam jual beli yang muncul ketika masyarakat berbelanja ke pasar modern adalah praktek pembulatan harga barang yang dilakukan oleh kasir. Praktek pembulatan harga ini juga terjadi di minimarket Murni yang terletak di Kecamatan Winong Kabupaten Pati. Sebagaimana yang terjadi ketika pembeli melakukan transaksi pembayaran dengan uang Rp. 200.000,- untuk total belanjaan adalah sebesar Rp.140.950,-, dimana seharusnya menerima kembalian Rp. 59.050,-, disini pembeli hanya menerima kembalian sebesar Rp. 59.000,-. Kemudian ketika pembeli melakukan transaksi pembayaran dengan total belanjaan sebesar Rp. 11.900,- dan pembeli membayar dengan uang Rp. 15.000,- pembeli hanya menerima kembalian sebesar Rp. 3.000,- saja pada seharusnya pembeli menerima kembalian Rp. 3.100,-. Pembulatan ini dilakukan oleh kasir tanpa meminta persetujuan atau pun menginformasikan kepada konsumen. Sehingga sering kali ketika berbelanja di minimarket Murni konsumen akan menemukan uang kembalian yang tidak sesuai dengan jumlah yang tertera distruk belanja.

² Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007, h. 145.

Jadi jual beli di minimarket Murni adalah jual beli dengan cara pembeli memilih barang dimana setiap barang sudah tertera harganya, setelah pembeli memilih barang kemudian dibawa ke kasir untuk memperoleh total barang yang harus dibayar. Saat transaksi pembayaran ini terjadi pembulatan harga dari sisa kembalian terhadap nominal kecil dengan tidak meminta persetujuan atau pun menginformasikan kepada pembeli, seperti nominal Rp. 100,- dan Rp. 50,-. Tentu hal seperti ini tidak dibenarkan dalam Islam, Hal ini tentu bertentangan dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَرْضَوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ... (النساء: ٢٩)

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. . .” (QS. An-Nisa’:29)³.

Pernyataan pada ayat di atas yang berbunyi “jalan yang tidak benar (*bi-bathil*)” berhubungan dengan praktek bermuamalah yang tidak sesuai dan bertentangan dengan syariat, dan hendaknya ketika melakukan perniagaan harus berlaku atas dasar suka sama suka atau saling meridhoi. Pembulatan harga yang dilakukan kasir hendaknya harus meminta persetujuan atau pun diinformasikan kepada

³ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Maghfirah dan Terjemahan*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006, h. 83.

konsumen, karena sekecil apapun nilai nominal kembalian yang dibulatkan adalah hak konsumen.

Terkait dengan praktek pembulatan harga ini sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur yaitu, mengacu pada pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomer 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan⁴. Praktek pembulatan harga memang diperbolehkan jika mengacu pada pasal 6 ayat (3), akan tetapi pembulatan hanya boleh dilakukan pada nilai nominal pecahan yang tidak beredar. Kemudian pada pasal yang sama ayat (4) mengatur bahwa pembulatan harga harus dengan menginformasikan kepada konsumen. Pada kenyataannya pembulatan harga tersebut lebih sering dilakukan sepihak oleh pelaku usaha, dan tanpa menginformasikan kepada konsumen saat transaksi pembayaran, tentu hal ini jelas sudah menyalahi peraturan tersebut.

Sementara dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan tidak mengatur lebih jelas mengenai pembulatan harga tersebut dibulatkan ke atas atau ke bawah dari harga barang atau tarif jasa. Sehingga pelaku usaha lebih dominan melakukan pembulatan harga ke bawah tanpa konfirmasi, yang mana dalam hal ini masyarakat sebagai konsumen yang dirugikan. Dalam Undang-

⁴ Pasal 6 Permendag RI No. 35 tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan, ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 29 Juli 2013.

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur dengan sangat jelas hak-hak Konsumen, yaitu pada Pasal 4 (UUPK)⁵.

Dari peraturan yang telah ada para pelaku usaha ritel tentunya hal ini bisa dijadikan acuan, sehingga praktik pembulatan harga bisa dihindari agar tidak merugikan salah satu pihak. Dan praktek pembulatan harga tanpa konfirmasi tidak menjadi kebiasaan, karena sekecil apa pun nilai nominal kembalian tetap harus diberikan kepada konsumen. Praktik pembulatan harga memang dilakukan di bawah Rp. 100 atau paling besar adalah di bawah Rp. 500 jika dilihat nominalnya memang kecil.

Jual beli yang ada di minimarket Murni jika dilihat lebih dekat, maka ada hal yang menarik untuk dikaji dalam hukum Islam, yaitu masalah praktek pembulatan harga yang dilakukan oleh kasir tanpa meminta persetujuan atau pun menginformasikan kepada konsumen, Berdasarkan fokus masalah dan latar belakang di atas, penulis ingin mengangkat masalah tersebut untuk dijadikan permasalahan dalam skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBULATAN HARGA DI MINIMARKET MURNI KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI”**.

⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pengembalian nominal kecil dalam jual beli di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembulatan harga di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara pengembalian sisa pembayaran terhadap nominal kecil di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap pembulatan harga di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati.
3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pembulatan harga di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka manfaat yang ingin dicapai adalah:

1. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap pengembangan Hukum Ekonomi Islam.
2. Sebagai bahan masukan bagi para pihak terkait dalam kegiatan transaksi pembulatan harga khususnya minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati.
3. Sebagai suatu karya ilmiah, yang selanjutnya dapat menjadi informasi dan sumber rujukan bagi para peneliti di kemudian hari.

E. Tinjauan Pustaka

Permasalahan pembulatan harga dalam transaksi jual beli minimarket dan swalayan sekarang ini bukan sesuatu yang asing lagi bagi masyarakat. Begitu pula dalam sebuah penelitian skripsi maupun literatur lainnya. Atas dasar itu, maka penulis melakukan peninjauan pustaka untuk menemukan karya ilmiah terdahulu yang membahas mengenai masalah pembulatan harga. Hal ini penulis lakukan guna menghindari duplikasi peneliti terhadap objek yang sama, serta menghindari anggapan plagiasi karya tertentu. Adapun literatur karya ilmiah yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan obyek kajian yang hampir sama, yaitu skripsi Riska Triana dari STAIN Ponorogo yang berjudul “*Analisis Fiqh Terhadap Praktek*

Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus di Swalayan Surya Ponorogo)”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa, penggenapan uang sisa pembelian dan penggantian uang sisa pembeli dengan permen di Swalayan Surya Ponorogo adalah diperbolehkan menurut fiqh, karena keberadaan hal tersebut berawal dari adanya kesulitan (*mashaqqah*) yang masuk dalam klasifikasi *ghairu mu’tadah* dan kesulitan tersebut juga ada pada tingkat kesulitan *mutawasitah*, sehingga pihak swalayan diperbolehkan mengambil *rukhsah*⁶.

Kemudian skripsi dari fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, yaitu skripsi Rosita Amalina “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Premium di SPBU Ngaliyan Kota Semarang*”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa, praktik jual beli premium di SPBU Ngaliyan sangat bergantung pada sumber daya manusianya (petugas). Praktek jual beli premium di SBPU Ngaliyan Kota Semarang, terkandung aspek penipuan dan pemaksaan pembulatan dalam pembayaran. Menurut hukum Islam, praktek jual beli premium di SPBU Ngaliyan berpeluang memunculkan ketidaksesuaian praktek jual beli dengan hukum Islam. Kemudahan pembayaran melalui pembulatan tidak dapat disebut kemaslahatan karena terkandung aspek pelanggaran syari’ah karena tidak sesuai dengan kaidah “Menolak kerusan lebih diutamakan daripada menarik

⁶ Skripsi, Riska Triana, *Analisis fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus di Swalayan Surya Ponorogo)*, Ponorogo, 2008, h. 68.

masalah, dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan masalah, maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya”⁷.

Penelitian yang hampir sama juga adalah skripsi Sekar Dhatu Indri Hapsari dari Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto yang berjudul “*Uang Kembalian Dari Pelaku Usaha Yang Tidak Sesuai Dengan Hak Konsumen di SPBU Ovis Purwokerto (Tinjauan Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)*”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa, tanggung jawab SPBU Ovis Purwokerto mengenai uang kembalian yang tidak sesuai dengan hak konsumen, PT. Satria Tirtamasgasindo bertanggung jawab atas kelalaian operator dalam tidak memberikan uang kembalian yang menjadi hak konsumen/pembeli. Hak konsumen tersebut sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 UUPK mengenai hak konsumen⁸.

Kemudian skripsi Rizki Kila Alindi dari Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “*Praktek Pembulatan Tarif Oleh Kantor Pos Dufan Malang Terhadap Barang-Barang Ekspedisi Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan*

⁷ Skripsi, Rosita Amalana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Premium di SPBU Ngaliyan Kota Semarang*, Semarang, 2013, h. 60-61.

⁸ Skripsi, Sekar Dhatu Indri Hapsari, *Uang Kembalian Dari Pelaku Usaha Yang Tidak Sesuai Dengan Hak Konsumen di SPBU Ovis Purwokerto (Tinjauan Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)*, Purwokerto, 2013, h. 74.

Fiqh Muamalah”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa, adanya pembulatan tarif yang dilakukan oleh Kantor Pos terdapat penyimpangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dengan beberapa alasan namun hal tersebut masih dianggap wajar apabila mengetahui alasan perusahaan mengadakan pembulatan tarif. Analisis fiqh muamalah yang dalam hal ini terdapat dalam akad ijarah jika dihubungkan dengan pembulatan tarif, maka selama masih memenuhi rukun dan syarat yang ada dalam konsep ijarah maka pembulatan tarif tersebut masih diperbolehkan. Kegiatan tersebut tidaklah menyimpang jika dikaji dari segi *ujrah*. Hanya saja pihak konsumen yang merasa dirugikan dengan adanya pembulatan tarif yang dilakukan sepihak menjadikan adanya riba (tambahan) yang dilarang dalam Islam. Oleh sebab itu seharusnya pihak Kantor Pos memberikan penjelasan secara jelas dan transparan alasan diadakannya pembulatan tarif⁹.

Penelitian selanjutnya skripsi Yasir Sadan dari fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *“Pengambilan Keuntungan Melalui Pembulatan Pada Bisnis Warung Internet Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Net City Yogyakarta)”*. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa, dalam proses pembulatan, pihak Net City tidak memberitahukan terlebih dahulu

⁹ Skripsi, Rizki Kila Alindi, *Praktek Pembulatan Tarif Oleh Kantor Pos Dufan Malang Terhadap Barang-Barang Ekspedisi Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah*, Malang, 2016, h. 76-77.

kepada pihak konsumen baik lisan maupun tulisan. Dengan demikian dari segi yuridis (UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen), terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang terdapat dalam pasal 4 yaitu hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur, dan kewajiban pelaku usaha yang terdapat dalam pasal 7 yaitu kewajiban memberi informasi yang benar, jelas dan jujur. Dari segi asas-asas mu'amalat, beberapa konsumen ada yang merasa dirugikan dan tidak rela dengan adanya pembulatan. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip mu'amalah yaitu prinsip mu'amalat dilakukan atas dasar sukarela (*'an-taradin*)¹⁰.

Karya ilmiah yang selanjutnya dari Jurnal Mozaic : Islam Nusantara yang ditulis oleh Drs. H. Marjaya, MA. yang berjudul "*Transaksi (Akad) Perdagangan di Swalayan Menurut Perdagangan Hukum Islam*". Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa, unsur pokok perdagangan atau jual beli Mu'athah ini adalah adanya *'an tarodhin* atau "saling merelakan". Saling merelakan itu sudah terealisasi atau terbukti ketika kedua belah pihak itu saling menyerahkan atau memberikan uang dan barang antara penjual/kasir dengan pembeli, karena itu maka perdagangan Mu'athah ini adalah

¹⁰ Skripsi, Yasir Sadan, *Pengambilan Keuntungan Melalui Pembulatan Pada Bisnis Warung Internet Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Net City Yogyakarta)*, Yogyakarta, 2012, h. 65-66.

mubah/Ja'iz/boleh. Jadi perdagangan model swalayan diperbolehkan dalam Hukum Islam¹¹.

Kemudian dari Jurnal Al-Ahkam yang ditulis oleh Nur Fathoni yang berjudul “*Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI*”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa, konsep jual beli dalam fatwa DSN-MUI mengacu pada formalitas prosedur akad dalam fiqh. Transaksi keuangan dilaksanakan dalam *iwadh* (ganti) berupa barang yang jelas dan wujud¹².

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa penelitian tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati belum ada yang mengkaji. Maka dari sinilah penulis ingin melakukan penelitian lebih mendalam mengenai praktik pembulatan harga dianalisis dari hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun metode yang digunakan meliputi sumber data, metode pengumpulan data, analisis dan lokasi penelitian. Berikut akan diuraikan beberapa hal yang harus diketahui, yaitu:

¹¹ Marjaya, *Transaksi (Akad) Perdagangan di Swalayan Menurut Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Mozaic: Islam Nusantara, Vol. 03 No. 02 September 2015. h.68.

¹² Nur Fathoni, *Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI*, Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam, Vol. IV / Edisi 1 / Mei / 2013. h. 79.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.¹³ Penulis melakukan penelitian secara langsung di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati, untuk mendapatkan data-data dan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian yang penulis kaji yaitu tentang pembulatan harga.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti¹⁴. Adapun yang menjadi sumber penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati, yaitu kepala toko, karyawan dan beberapa orang pembeli.

¹³ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, h. 21.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 106.

b. Data Skunder

Data skunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan¹⁵. Data skuder dalam penelitian ini berupa dokumen resmi yang dimiliki oleh minimarket Murni, seperti struk belajaa, display harga yang tertera, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki oleh minimarket Murni, kemudian Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan. Setelah data tersebut sudah terkumpul akan digunakan sebagai pijakan dalam penelitian praktik pembulatan harga di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang penulis lakukan dalam pengumpulan data antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan

¹⁵ *Ibid.* h. 106.

dalam penelitian¹⁶. Melalui metode ini akan dikumpulkan data yang berkaitan dengan persoalan yang sedang diteliti dari sumber yang dijumpai selama observasi berlangsung.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu¹⁷. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara beracana (*standardized interview*), yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, dan wawancara tak berencana (*unstandardized interview*), yaitu suatu wawancara yang tidak disertai dengan suatu daftar pertanyaan¹⁸. Wawancara ini dilakukan dengan kepala toko, wakil kepala toko, kasir, dan beberapa pembeli untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai praktik pembulatan harga di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati.

¹⁶ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 105.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet-26, 2009, h. 186.

¹⁸ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, h. 84.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset, rekaman video, foto dan lain sebagainya¹⁹.

Pengumpulan data melalui dokumentasi ini berupa foto struk belanja milik pembeli dan *display* harga yang ditampilkan di rak minimarket, dokumentasi ini dilakukan untuk memperoleh data yang lebih dalam lagi mengenai praktik pembulatan harga di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul semua, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah ada. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data skunder²⁰.

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian

¹⁹ Sukandarrumudi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012, h. 47.

²⁰ Ali, *Metode...*, h. 107.

dianalisis²¹. Peneliti berusaha mengumpulkan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, guna menggambarkan bagaimana praktik pembulatan harga di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati.

G. Sistematika Penulisan

Sebagai jalan untuk mempermudah pemahaman mengenai permasalahan di atas, sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I Menguraikan tentang pendahuluan, yang memberi gambaran secara umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II membahas tentang teori jual beli dalam pandangan Islam, yang meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam, *Bay' al-mu'âthâh*, serta penetapan harga (*tas'îr*) dalam jual beli.

BAB III membahas tentang pelaksanaan penetapan harga dalam praktek pembulatan harga di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati, menjelaskan dan menggambarkan tentang profil minimarket Murni Kec. Winong Kab. Pati, yang berisi tentang

²¹ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998, h. 128.

sejarah singkat berdirinya minimarket Murni, susunan kepengurusan, SDM dan pembagian kerja, pemasaran, serta macam-macam produk yang diperjual-belikan, manajemen penetapan harga, menjelaskan tentang praktik pembulatan harga dan tanggapan dari masyarakat sebagai konsumen terhadap praktik pembulatan harga di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati.

BAB IV membahas tentang bagaimana praktek pengembalian nominal kecil dalam jual beli di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati? serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik pembulatan harga di minimarket Murni Kec. Winong Kab. Pati?

BAB V bagian penutup yang memuat tentang kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

TEORI JUAL BELI (*BAI'*) DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu (البيع) , yang jama'nya adalah “بيوع” dan konjugasinya adalah البياع¹ yang berarti menjual¹. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya. Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli². Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijârah*³. Jadi, pada dasarnya *al-bai'* secara bahasa yaitu jual-beli.

Jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata jual beli (*Bai'*) memiliki arti persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang

¹A. W. al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984, h. 124.

²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Persada, 2007, h. 111.

³Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 73.

membayar harga barang yang dijual⁴. Dalam KUHPerdata juga menjelaskan bahwa, jual beli (*bai'*) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak pembeli untuk menyerahkan harga barang yang telah diperjanjikan⁵.

Kemudian secara istilah, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh beberapa ulama fiqh, sekalipun banyak perbedaan pendapat di antara para ulama fiqh tersebut, substansi dan tujuan masing-masing dari definisi yang mereka kemukakan adalah sama.

Pengertian jual beli menurut Sayyiq Sabiq, yaitu:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي، أَوْ نَقْلٌ مِنْكَ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ
الْمَأْذُونِ فِيهِ.

⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, edisi 3, h. 987.

⁵Ninieck Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, cet. Ke-8, h. 325.

Artinya:

“Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhoi atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan”⁶.

Jual beli adalah pertukaran benda dengan benda atau memindahkan hak milik, serta menyerahkan pengganti atas benda yang ditukar dengan saling meridhoi atau dengan kata lain saling merelakan dengan jalan yang diperbolehkan.

Ulama Hanafiyah mengemukakan pendapatnya tentang jual beli, yaitu:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ, أَوْ مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرَّغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ
عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ.

Artinya:

“Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu,”. Atau, “tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”⁷.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009, jilid 3, h. 35.

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011, jilid 5, cet. Ke-1, h. 25.

Pendapat tersebut mengandung pengertian bahwa “cara yang khusus”, yang dimaksud ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli⁸.

Lebih lengkap lagi Ibnu Rusyd mengartikan jual beli, yaitu ada yang memiliki melalui segi sifat akad (perjanjian) dan keadaannya, dan ada pula yang ditilik dari sifat yang dijual. Jika jual beli tersebut antara harga dengan harga dinamakan *sharf*, jika antara harga dengan barang dinamakan umum. Jika jual beli secara bertempo antara barang dengan tanggungan dinamakan *salam*. Jika jual beli didasarkan pada pilihan dinamakan *khiyar*, berdasarkan penentuan laba dinamakan *murabahah*, sedangkan jika jual beli didasarkan atas penambahan maka disebut *muzayadah*⁹.

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, cet. Ke-1, h. 68.

⁹ Ibnu Ruysd, *Bidayatul Mujtahid (Analisis Fiqih Para Mujtahid)*, terj. Imam Ghazali Said, dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Imani, 2002, cet. Ke-2, h. 698.

Idris Ahmad mendefinisikan jual beli secara lebih singkat, yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan¹⁰.

Melengkapai pengertian di atas, Hendi Suhendi mengartikan jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati¹¹.

Jadi dari bebera pengeritian jual beli (*Bai'*) di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya jual beli adalah akad saling tukar-menukar, baik barang dengan barang atau barang dengan uang, berdasarkan kerelaan (kesepakatan) antara kedua belah pihak, melalui jalan yang diperbolehkan dan dibenarkan oleh

¹⁰ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986, h. 5.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010, edisi 1, cet. Ke-5, h. 68-69.

syara', dengan demikian beralihlah hak milik atas benda atau barang dan uang di antara mereka.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli (*Bai'*) merupakan sarana tolong menolong antara sesama umat manusia dalam rangka untuk memenuhi hajat hidupnya. Jual beli (*Bai'*) adalah akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukumnya jual beli hukumnya adalah mubah, kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', berikut ini adalah dasar hukum jual beli:

1. Dasar hukum jual beli dalam al-Qur'an
 - a. Firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: ٢٧٥)

Artinya:

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. al-Baqarah : 275)¹².

¹² Departemen Agama RI, AL-Qur'an Maghfirah dan Terjemahan, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006, h. 47.

b. Firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ... (البقرة: ١٩٨)

Artinya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...” (QS. An-Baqarah: 198)¹³

c. Firman Allah dalam QS. an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ... (النساء: ٢٩)

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...” (QS. an-Nisa: 29)¹⁴.

Ayat-ayat al-Qur'an di atas menjelaskan, bahwa jual beli (*Bai'*) hukumnya adalah boleh dan

¹³ *Ibid.* h. 31.

¹⁴ *Ibid.* h. 83.

justru dianjurkan. Jual beli yang didasari keridhoan dan suka sama-suka adalah sarana jalan mencari nafkah karena Allah menghalalkannya. Sebaliknya Allah Mengharamkan riba, karena hal ini dapat menyengsarakan sesama.

Ayat-ayat di atas juga mengidentifikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara bathil dalam konteks memiliki arti yang sangat luas diantaranya, melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis bunga (riba), transaksi yang bersifat spekulatif judi (maisir), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya resiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu. Jadi, sudah sangat jelas antara yang dihalalkan dan diharamkan.

2. Dasar hukum jual beli dalam Hadits adalah:

Dasar hukum jual beli dalam hadits Rasulullah saw. Bersabda dari Rifa'ah ibn Rafi', yaitu:

عَنْ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيْ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُورٍ (رواه البزّاء و محمد الحاکم)

Artinya:

“Dari Rifa’ah bin Rafi ra. sesungguhnya Nabi ditanya tentang pekerjaan (profesi) apa yang paling baik, beliau menjawab: pekerjaan seorang lelaki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)¹⁵.

Pekerjaan yang paling baik bagi seorang muslim adalah usaha yang dilakukan dengan tangannya sendiri, kemudian adalah jual beli yang dilakukan dengan jujur, tanpa diiringi dengan kecurangan, tidak ada dusta penyamaran barang yang dijual, seperti menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Dengan mengutamakan sikap kejujuran dalam jual beli, maka jual beli tersebut akan mendapatkan berkah dari Allah.

Rasulullah saw. Bersabda dari Hakim bin Hizam:

¹⁵ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Muh. Syarief Sukandi, Bandung: Al-Ma’rif, 1993, h. 284.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ, ح: وَحَدَّثَنَا
عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا:
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ, عَنْ
حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ
مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا, فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّتَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا, وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَا
مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعَهُمَا .
(رواه مسلم)

Artinya:

“Muhammad bin al-Mutsanna menyampaikan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Syu'bah; dalam sanad lain: Amr bin Ali menyampaikan kepada kami dari Yahya bin Sa'id dan Abdurrahman bin Mahdi, dari Syu'bah, dari Qatadah dari Abu al-Khalil, dari Abdullah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam bahwa Nabi saw. Bersabda, ”dua orang yang melakukan jual beli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan keadaan barang, mereka akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli mereka. Namun, jika keduanya berdusta dan menutupi aib (tidak terbuka), niscaya akan hilang keberkahan jual beli mereka”. (HR. Muslim)¹⁶.

¹⁶ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadits 4; Shahih Muslim 2*, terj. Masyhri dan Tatam Wijaya, Jakarta: Almahira, 2012, cet. Ke- 1, h. 9.

Pedang dan pembeli masih memiliki hak untuk memilih (*khiyar*) sebelum mereka berpisah, serta tidak kebohongan (menutupi aib) dalam jual beli tersebut, karena kejujuran dalam jual beli menjadi sebab mendapatkan keberkahan dalam jual beli itu sendiri, sedangkan dusta adalah penyebab dicabutnya keberkahan.

3. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan, harus diganti dengan barangnya lain yang sesuai¹⁷.

Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan diisyaratkannya, jual beli

¹⁷ Suhendi, *Fiqh...*, h. 75.

merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain¹⁸.

Ijma' dibolehkannya jual beli tentu menjadi jalan untuk mempermudah manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan bantuan orang lain.

4. Kaidah fiqh¹⁹

Ibnu Taimiyah menyatakan kaidah fiqhnya tentang kebolehan jual beli, sebagaimana yang dikutip oleh A. Djazuli, yaitu:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Artinya:

*“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*²⁰.

¹⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 73.

¹⁹ Mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang selalu menggunakan kaidah fiqhnya dalam setiap keputusan-keputusannya.

²⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 130.

Kaidah tersebut menyatakan dalam setiap transaksi atau kegiatan bermuamalah (jual-beli, sewa-menyewa, gadai, serta bentuk kerjasama seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, dll), pada dasarnya adalah dibolehkan, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُنْعَا قَدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا إِتْرَمَاهُ بِاتَّعَافِدِ

Artinya:

*“Hukum asal transaksi adalah keridhoan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang dilaksanakan”*²¹

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu, bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa

²¹ *Ibid.*, h. 137.

tertipu, artinya hilang keridhaannya. Maka, akad tersebut bisa batal. Seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya cacat²².

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) merupakan suatu akad yang akan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Mengenai rukun dan syarat jual beli (*al-Bai'*), terdapat beberapa perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh, berikut ini adalah uraiannya.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua

²² *Ibid.*

belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qobul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang²³.

Jumhur ulama menyebutkan rukun jual beli itu ada empat²⁴, antara lain sebagai berikut:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqaid* (penjual dan pembeli).
2. Ada *shighat* (ijab dan Kabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Sementara Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariat rukun jual beli (*bai'*) disebutkan hanya tiga, yaitu²⁵:

1. Pihak-pihak.
2. Objek, dan

²³ Haroen, *Fiqh...*, h. 115.

²⁴ Sohari Sahrani, dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, cet. Ke-1, h. 67.

²⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, edisi revisi, cet. Ke-1, h. 30.

3. Kesepakatan,

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli, antara lain sebagai berikut:

1. Syarat-syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli), antara lain sebagai berikut²⁶:
 - a. Keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum Islam dikenal dengan *baligh* dan berakal sehat. Berdasarkan syarat ini maka jual beli dibawah umur dan orang yang tidak berpikiran sehat (gila), menurut jumhur ulama dianggap tidak sah.
 - b. Keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri. Karena itu apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental, maka menurut jumhur ulama, jual beli tersebut tidak sah.
2. Syarat-syarat terkait *shighat*, antara lain sebagai berikut²⁷:

²⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011, h. 58.

²⁷ Sabiq, *Fiqh...*, h. 37.

- a. Masing-masing saling bersambung dengan yang lain dalam satu majelis tanpa ada pemisah.
 - b. Ijab sesuai dengan Kabul dalam menunjukan apa yang wajib diridhai oleh kedua pihak, yaitu barang yang dijual dan penukar.
 - c. Ijab dan Kabul menggunakan lafazh lampau (*madhi*) atau menggunakan lafazh *mudhari* yang dimaksudkan untuk masa sekarang.
3. Syarat-syarat *Ma'qud'alaih*, antara lain sebagai berikut²⁸:
- a. Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad.
 - b. Benda yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga.
 - c. Benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual.
 - d. Benda yang dijual dapat diserahterimakan pada waktu akad.
- a. Syarat-syarat nilai tukar barang, antara lain sebagai berikut:

²⁸ Huda, *Fiqh*..., h. 62-66.

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqih membedakan *at-tsaman* dengan *al-si'r*. menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-tsaman*²⁹.

Syarat-syarat *al-tsaman*, antara lain sebagai berikut³⁰:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

²⁹ Haroen, *Fiqh...*, h. 118-119.

³⁰ Mustafa Ahmad Zarqa, *al-'Uqud al-Musammah*, Damaskus: Dar al-Kitab, 1968, h. 67.

- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekaligus secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar barang yang diharamkan oleh syara'.

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, terdapat juga syarat-syarat lain, yaitu³¹:

- 1. Syarat sah jual beli. Mayoritas ulama menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:
 - a. Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan,

³¹ Haroen, *Fiqh...*, h. 119-120.

mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

- b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan '*urf*' (kebiasaan) setempat.
2. Syarat yang terkait dengan jual beli. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kuasa untuk melaksanakan akad.
3. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama fiqh sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli), apabila jual beli itu masih mempunyai hak

khiyar, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.

Dari semua syarat-syarat di atas, secara umum mempunyai tujuan untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan).

D. Bentuk-Bentuk Jual beli yang Dilarang Dalam Islam

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, Jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*shahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli *shahih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan shara', baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasisid*) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, kata rusak dan batal memiliki arti yang sama³².

³² Syafei, *Fiqh...*, h. 91-92.

Sedangkan ulama Hanafiyah membagi jual beli menjadi tiga, yaitu jual beli sah, jual beli rusak (*fâsid*), dan jual beli batal³³. Jual beli yang sah adalah jual beli yang disyariatkan baik hakikatnya maupun sifatnya dan tidak ada kaitannya dengan hak orang lain, juga tidak ada hak *khiyar* di dalamnya³⁴.

Jual beli yang batal adalah jual beli yang tidak terpenuhinya rukun dan objeknya, atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. Artinya, pelaku atau objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum untuk melakukan transaksi. Jual beli yang rusak (*fâsid*) adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tapi tidak legal dari sisi sifatnya. Artinya, jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak pada barang yang layak, tapi mengandung sifat yang tidak sesuai syariat, seperti menjual barang yang tidak jelas³⁵.

Berkenaan dengan bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam ada banyak, antara lain sebagai berikut:

³³ az-Zuhaili, *Fiqih...*, h. 90.

³⁴ *Ibid.* h. 91.

³⁵ az-Zuhaili, *Fiqih...*, h. 92.

1. Terlarang sebab orang yang berakad

Jumhur ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan *shahih* apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah melakukan jual beli, yaitu³⁶:

- a. Jual beli yang dilakukan oleh orang gila
- b. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil
- c. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta
- d. Jual beli yang dilakukan oleh orang yang terpaksa atau dalam paksaan
- e. Jual beli *fudhul*, yaitu jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya
- f. Jual beli orang yang terhalang
- g. Jual beli *malja*, yaitu jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim.

2. Terlarang sebab *shighat*

Mayoritas ulama telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhoan antara

³⁶ Syafei, *Fiqh...*, h. 93-95.

pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian antara ijab dan qabul, berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang terlarang karena *shighat*, antara lain sebagai berikut³⁷:

- a. Jual beli melalui surat atau melalui utusan
 - b. Jual beli dengan isyarat atau tulisan
 - c. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad
 - d. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul
 - e. Jual beli *munjiz*
3. Terlarang sebab *ma'qud alaih*

Mayoritas ulama sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang berakad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan oleh syara', berikut ini adalah jual beli yang dilarang sebab *ma'qud alaih*, yaitu³⁸:

- a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

³⁷ *Ibid.*, h. 95-97.

³⁸ *Ibid.*, h. 97-99.

- b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan
 - c. Jual beli *gharar*
 - d. Jual beli barang najis dan yang terkena najis
 - e. Jual beli air
 - f. Jual beli barang yang tidak jelas (*mahjul*)
 - g. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (gaib), tidak dapat dilihat
 - h. Jual beli sebelum dipegang
 - i. Jual beli buah-buahan yang belum matang
4. Terlarang sebab syara'

Mayoritas ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, di antaranya sebagai berikut³⁹:

- a. Jual beli riba
- b. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan
- c. Jual beli barang dari pencegatan barang sebelum sampai pasar

³⁹ *Ibid.*, h. 99-101.

- d. Jual beli waktu adzan jum'at
- e. Jual beli anggur untuk dijadikan khamar
- f. Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil
- g. Yang beli yang sedang dibeli atau ditawarkan oleh orang lain
- h. Jual beli memakai syarat

E. Jual Beli di Minimarket (*Bai al-Mu'âthâh*)

1. Pengertian

Di zaman modern ini perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual, tanpa ada ucapan apa pun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di pasar swalayan. Dalam fiqih Islam, jual beli seperti ini disebut dengan *bai' al-mu'âthâh*⁴⁰.

Jual beli (*Bai'*) disebut juga dengan kata *asy sira'*, *al mubadalah*, dan *at tijarah*. Menurut etimologi jual beli diartikan sebagai “pertukaran

⁴⁰ Haroen, *Fiqh*...h.117.

sesuatu dengan sesuatu” atau “ saling menyerahkan sesuatu”. *Bai' al-mu'âthâh* secara istilah menurut Wahbah az-Zuhaili, yaitu yang dimaksud *bai'ul al-mu'âthâh* adalah ketika kedua belah pihak sepakat atas barang dan harga, keduanya juga memberikan barangnya tanpa ada ijab maupun qabul. Namun terkadang, ada juga kata-kata dari salah satu pihak⁴¹.

Pendapat lain tentang Jual beli *mu'âthâh* adalah jual beli dengan cara memberikan barang dan menerima pembayaran tanpa ijab dan Kabul oleh pihak penjual dan pembeli, sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat sekarang⁴². Jadi bisa disimpulkan bahwa jual beli *al-mu'âthâh* adalah jual beli dengan cara saling menyerahkan barang dan pembayaran tanpa ijab qabul, dengan demikian jual beli *mu'âthâh* telah disepakati oleh pihak yang berakad, berkenaan dengan barang maupun

⁴¹ az-Zuhaili, *Fiqh...*, h. 31.

⁴² Syaikh al-Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mahzab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi Press, 2010, cet. Ke- 13. 214.

harganya. Ijab qabul diwujudkan dalam bentuk tindakan tanpa adanya ucapan.

2. Hukum *bai' al-mu'âthâh*

Dalam kasus perwujudan ijab dan qabul melalui sikap ini (*bai' al-mu'âthâh*) terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal itu sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri, karena hal itu telah menunjukkan unsur ridha dari kedua belah pihak. Ulama Syafi'iyah berpendapat, bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindirin, melalui kalimat ijab dan qabul. Menurut mereka, jual beli *bai' al-mu'âthâh* hukumnya tidak sah, baik jual beli itu dalam partai besar maupun dalam partai kecil. Alasan mereka adalah unsur utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Unsur kerelaan, menurut mereka adalah masalah yang amat tersembunyi di dalam hati,

karenannya perlu diungkapkan dengan kata-kata ijab qabul⁴³.

Sementara sebagian ulama Syafi'i seperti Imam an-Nawawi, al-Baghawi, dan Imam Mutawalli menganggap sah transaksi semacam ini pada semua transaksi jual beli yang biasa dilakukan oleh orang-orang. sebab, tidak ada dalil yang mensyaratkan harus adanya kata-kata. Karena itulah, rujukannya selalu pada tradisi (*'urf*) seperti kata-kata umum lainnya⁴⁴. Akan tetapi, masih ada sebagian ulama Syafi'iyah lainnya membedakan antara jual beli dalam jumlah besar dan juga jual beli dalam jumlah kecil. Menurut mereka, apabila yang jual beli tersebut dalam jumlah besar, maka jual beli *bai' al-mu'âthâh* tidak sah, tetapi apabila jual beli dalam jumlah kecil, maka jual beli *bai' al-mu'âthâh* hukumnya sah⁴⁵.

Hanafi, Maliki, dan pendapat paling kuat dalam mazhab Hanbali berpendapat bahwa jual beli

⁴³ Haroen, *Fiqh...*, h. 117.

⁴⁴ az-Zuhaili, *Fiqh...*, h. 32.

⁴⁵ Haroen, *Fiqh...*, h. 117.

jenis ini (*bai' al-mu'âthâh*) sah jika sudah menjadi kebiasaan dan ada kerelaan, serta menggambarkan keinginan masing-masing pelaku transaksi⁴⁶. Orang-orang sering melakukan jual beli jenis ini di pasar setiap waktunya, dan terus berkembang hingga sekarang ini, dan tidak pernah terdengar adanya rasa keberatan dari siapa pun.

Hukum jual beli *al-mu'âthâh* adalah boleh, apabila hal itu sudah menjadi suatu kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Jual beli *al-mu'âthâh* sekarang ini masih ada dan terus berkembang di pasar-pasar modern, seperti di swalayan atau supermarket, dan minimarket.

F. Penetapan Harga (*Tas'îr*)

Harga dalam bahasa Inggris dikenal dengan *price*, sedangkan dalam bahasa arab berasal dari kata *tsaman* atau *si'ru* yaitu nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka⁴⁷. Harga didefinisikan

⁴⁶ az-Zuhaili, *Fiqh...*, h. 31.

⁴⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pres, 2015, h. 154.

sebagai nisbah pertukaran barang dengan uang. Dalam masyarakat modern, nilai harga barang tidaklah dinisbahkan kepada barang sejenis tetapi dinisbahkan kepada uang⁴⁸.

Sementara Sayyid Sabiq mendefinisikan *tas'îr* adalah penetapan harga barang-barang yang hendak dijual-belikan tanpa menzalimi pemilik dan tanpa memberatkan pembeli⁴⁹. Jadi, bisa disimpulkan secara singkat bahwa *tas'îr* adalah penetapan harga barang.

Nilai-nilai syariat mengajak seorang muslim untuk menetapkan konsep *tas'îr* (penetapan harga) dalam kehidupan ekonomi, menetapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam komoditas yang dijadikan objek transaksi, serta dapat dijangkau oleh masyarakat. Konsep ini diterapkan dalam setiap kondisi ekonomi, bukan hanya karena dipaksa dalam suatu kondisi ekonomi yang sedang mengalami krisis atau pun paceklik. Dengan adanya *tas'îr*, maka akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak

⁴⁸ Abdul Mun'in al-Jamal, *al-Mausuah al-Iqtishad al-Islami*, Kairo: Dar al-Kitab al-Misri, 1980, h. 562.

⁴⁹ Sabiq, *Fiqih...*, h. 79.

dapat dijangkau oleh masyarakat⁵⁰. jadi, konsep *tas'ir* ini ditetapkan berdasarkan nilai dalam sebuah komoditas disegala situasi ekonomi, bukan hanya ditetapkan pada saat tertentu saja. Ketika *tas'ir* ini berjalan dengan baik, maka kondisi ekonomi akan sangat baik dengan persaingan yang baik pula, karena dalam Islam sendiri melarang untuk meninggikan harga.

Dalam sebuah hadits Rasulullah saw. Bersabda dari Anas ra. Berkata:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ وَثَابِتٍ وَقَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: عَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ الْمُسَعِّرُ، وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ بِدَمٍ وَلَا مَالٍ. (رواه ابو داود)

Artinya:

“Amr bin Aun mengambarkan kepada kami dari Ashim, Hammad bin Salamah mengambarkan kepada kami dari Humaid, Tsabit dan Qatadah, dari Anas, dia berkata, “Pada zaman Rasulullah saw, harga-harga

⁵⁰Abdul Sami' al-Mishri', *Muqawwimat al Iqtishad al Islami*, terj. Dimyauddin Djuwaini, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, h. 95.

(barang) naik. Orang-orang berkata, 'Wahai Rasulullah, harga barang melambung tinggi, oleh karena itu tetapkanlah harga (barang) untuk kami.' Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah adalah Sang Pencipta, Penggenggam, Pembentang rezeki, Pemberi rezeki, dan Penetapan harga. Aku berharap bertemu dengan Tuhanku dan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntut perbuatan zalim yang pernah aku lakukan kepadanya, baik berupa darah maupun harta". (HR. Abu Dawud)⁵¹.

Mayoritas ulama menyimpulkan hadits ini, bahwa haram bagi penguasa untuk menentukan harga barang-barang karena hal itu adalah sumber kedzaliman. Masyarakat bebas untuk melakukan transaksi finansial, dan pembatasan terhadap mereka bertentangan dengan hadits tersebut. Penetapan harga mengakibatkan hilangnya harga⁵². Jadi, hal ini mengakibatkan kenaikan harga, dan tentu saja kenaikan harga membahayakan orang-orang fakir. Mereka tidak mampu untuk membeli barang-barang dengan harga yang tinggi. Sementara hanya orang-orang kaya saja yang mampu membeli.

⁵¹ Imam Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi*, terj. Ahmad Hotib & Fathurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. 567-568.

⁵² Sabiq, *Fiqih...*, h. 80.

Akan tetapi tidak serta merta penetapan harga ini dilarang, *rukhsah* penetapan harga dibolehkan saat dibutuhkan. Hal ini berlaku apabila para pedagang bertindak sewenang-wenang dan melampaui batas sehingga membahaya pasar, maka wajib bagi penguasa untuk melakukan intervensi dan menetapkan harga demi menjaga hak-hak masyarakat, demi mencegah penimbunan dan menghilangkan kedzaliman yang menimpa mereka karena kesrakahan para pedagang yang curang⁵³.

Imam Malik membolehkan pembatasan harga, seebagian dari ukama mazhab Syafi'i juga membolehkannya ketika harga-harga mahal. Selain itu Imam Zaidiyah, di antaranya adalah Said bin Musayyab, Rabi'ah bin Abdurrahman, dan Yahya bin Sa'ad al-Anshari mereka semua membolehkan adanya penetapan harga apabila maslahat masyarakat umum mengharuskan hal tersebut⁵⁴.

Dengan demikian pada dasarnya penetapan harga (*tas'îr*) dilarang, karena penetapan harga barang-

⁵³ *Ibid.*, h. 80-81.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 81.

barang diserahkan kepada masyarakat, dimana penetapan harga pada barang disesuaikan dengan nilai yang terkandung dalam setiap komoditas barang. Dalam hal ini penguasa tidak dibolehkan ikut campur, kecuali pada saat dibutuhkan, yaitu ketika terjadi kenaikan harga yang begitu tinggi yang dimainkan oleh para pedagang yang curang, sehingga mengganggu kemaslahatan masyarakat. masyarakat kesulitan untuk mendapatkan barang karena harganya yang tinggi, bahkan hal ini juga bisa menyebabkan kelangkaan barang-barang.

BAB III

PRAKTEK PEMBULATAN HARGA DI MINIMARKET MURNI KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI

A. Gambaran Umum di Minimarket Murni Winong

1. Profil Minimarket Murni

Minimarket Murni merupakan usaha ritel pertama di kecamatan Winong yang didirikan oleh keluarga Bapak Juhari atas inisiatif dari sang istri, yaitu Ibu Murni yang pada saat itu di kecamatan Winong belum ada satu pun minimarket yang berdiri, dan menangkap adanya sebuah peluang usaha disana. Nama “Murni” sendiri diambil dari nama istri beliau. Murni pertama kali dibuka pada tahun 2001, saat itu menjadi minimarket yang pertama kali berdiri di Kecamatan Winong¹.

Sebuah usaha yang akan didirikan tidak boleh melewatkan satu hal, yaitu melengkapi perizinan usaha. Salah satu diantaranya adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Setiap usaha perdagangan wajib untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.289/MPP/Kep/10/2001

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Juhari selaku Pemilik Murni pada tanggal 26 April 2017.

tentang Ketentuan Standar Pemberian SIUP². SIUP dibagi menjadi SIUP Kecil, SIUP Menengah, dan SIUP Besar³.

Minimarket Murni sendiri sudah mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan masuk dalam kategori SIUP Kecil dengan No: 512/11-05/PK/XI/2001 dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pati⁴.

Murni beroperasi dari awal berdiri hingga sekarang ini sudah hampir 16 tahun berjalan usahanya yang berada dilokasi yang strategis di Jl. Winong-Pucakwangi KM. 1 Winong, Kabupaten Pati, dalam menjalankan usahanya Murni Winong- sudah mengalami pasang surut, persaingan usaha yang datang dari gerai-gerai minimarket lain tidak membuat Murni turun pamor sebagai minimarket pionir di kecamatan Winong. Murni terus melakukan inovasi, baik dari segi penyediaan barang kebutuhan dari berbagai jenis dan merek, fasilitas yang aman dan nyaman, serta pelayanan yang ramah.

Murni sampai saat ini dipercayakan dan dikelola oleh keluarga terdekat Bapak Juhari, yaitu Bapak Edi Hartanto yang ditunjuk sebagai kepala toko yang diberi wewenang dan

²www.academia.edu/11024548/UNDANG_UNDANG_TENTANG_III_N_USAHA_PERDAGANGAN_SIUP/. Diakses pada tanggal 28 April 2017.

³https://id.m.wikipedia.org/wiki/Surat_Izin_Usaha_Perdagangan/. Diakses pada tanggal 28 April 2017.

⁴ Dokumentasi Minimarket Murni, Hasil wawancara dengan Bpk. Edi Hartanto (Olid) sebagai kepala toko di minimarket Murni Winong pada tanggal 25 April 2017.

kepercayaan untuk mengurus segala hal yang menyangkut Murni, baik pemenuhan barang dagangan dan struktur organisasi, perekrutan karyawan, dan pembagian kerja setiap karyawan⁵.

Minimarket Murni mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan toko kembar (Ibu Tutik).
- b. Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya Winong Pucakwangi.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan toko mebel CV. Cahaya Mina (Pak Dzofir).
- d. Sebelah timur berbatasan dengan toko buku dan *fotocopy* El-Ghaza (Pak Nur Huda).

Karyawan yang berada di Murni sampai saat ini berjumlah 13 orang yang terdiri dari 1 kepala toko, 1 wakil kepala toko, 8 pramuniaga dan 3 kasir.

2. Visi dan Misi Minimarket Murni

Visi dan Misi minimarket Murni adalah sebagai berikut:

a. Visi

Menjadikan kebutuhan semua orang dapat terpenuhi, membuat waktu semua orang menjadi lebih efisien dan kebutuhan pokok semua orang dapat terpenuhi, mewujudkan minimarket Murni sebagai tempat berbelanja favorit untuk masyarakat.

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Juhari selaku Pemilik Murni pada tanggal 26 April 2017.

b. Misi

- 1) Menciptakan sumber daya manusia (SDM) ritel local yang tanggung dan profesional.
- 2) Memberikan kepuasan kepada konsumen/pelanggan adalah sebagai tujuan utama dengan pelayanan yang baik.
- 3) Menyediakan produk dengan kualitas terbaik dan terbaru dengan harga yang kompetitif, dengan fasilitas tempat berbelanja yang aman dan nyaman.

B. Sumber Daya Manusia (SDM), Struktur Organisasi dan *Job Discription* (pembagian kerja)

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu unsur penting dalam menjalankan sebuah usaha disamping unsur-unsur lain, seperti modal, peluang pasar, teknik *marketing*, dan lain-lain. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas adalah penunjang keberhasilan sebuah usaha. Usaha yang maju dan dapat berkembang tidak hanya berdasarkan besarnya modal yang dimiliki atau peluang pasar yang luas. Meskipun seorang pengusaha modal yang besar tetapi tidak memiliki kualitas sumber daya manusia yang mumpuni, maka akan sulit untuk bisa menjalankan dan memutar modal usaha yang telah dikeluarkan dalam bisang usaha.

Minimarket Murni sebagai suatu unit usaha yang telah berkembang dan selalu berusaha untuk memilih sumber daya

manusia yang berkualitas serta beretos kerja tinggi. Minimarket Murni dalam menjalankan usahanya sampai saat ini memiliki 13 karyawan yang semuanya sudah dibagi dalam posisi tugas yang berbeda-beda, yang terdiri dari 3 orang karyawan laki-laki, 10 orang karyawan perempuan. Tiga belas karyawan minimarket Murni terbagi menjadi dua *shift*, yaitu untuk *shift* pagi dari jam 7.00 – 15.00 WIB, dan *shift* malam dari jam 12.30 – 20.30 WIB⁶.

Minimarket Murni tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan tanpa ada karyawan di dalamnya. Maka dari itu, diperlukan adanya karyawan yang akan bertanggungjawab mengelola, merawat, dan menjalankan sistem operasional toko. Sistem operasional toko sendiri telah ditentukan untuk dijalankan karyawan yang berada di dalam toko tersebut, tanggungjawab dan tugas karyawan dibedakan berdasarkan jabatan yang telah dicapai karyawan tersebut, terdapat karyawan yang memiliki jabatan dan tugas masing-masing yang terdiri dari⁷:

1. Kepala Toko : Edi Hartanto (Olid)
2. Wakil Kepala Toko : Nita Kartika
3. Pramuniaga : - Yuli F.

- Dian Fatmawati

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Nita Kartika sebagai wakil kepala toko di *minimarket* Murni pada tanggal 25 April 2017.

⁷ Dokumentasi *Minimarket* Murni, Hasil wawancara dengan Bpk. Edi Hartanto (Olid) sebagai kepala toko di *minimarket* Murni Winong pada tanggal 25 April 2017.

- Ida Nur K.
- Rini Hastuti
- Lina Aprilia
- Siti Sholikhah
- Riyadi (gudang)
- Arik (gudang)

4. Kasir : - Tutut Artika
- Maya Herni Puspita
 - Siti Fatimah (Kasir Cadangan)

5. *Bauty Advisor* (BA)⁸ : - Wardah (Putri Widiyari)
- Ristra (Hartinah)
 - Inez (Yuli Khalida)
 - Ranez (Ayu)

Minimarket Murni dalam menjalankan operasionalnya memberikan pembagian kerja (*job description*) kepada para pegawainya sesuai dengan posisi masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar dalam menjalankan tugasnya para karyawan tidak kebingungan akan kewajiban dan tanggungjawab yang harus dilakukan selama bekerja dan dalam upaya mencegah saling bertukarnya posisi tugas.

⁸*Beauty advisor* (Ba) dapat berganti sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing perusahaan, dan dapat diganti sewaktu-waktu.

Pembagian kerja (*job description*) yang diterapkan oleh minimarket Murni kepada para pegawainya adalah sebagai berikut:

1. Prosedur operasional *Chief of Store* (COS)/ Kepala Toko

Chief of store (COS)/ kepala toko adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program kerja operasional toko dengan mendayakan sumber daya yang ada untuk pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan dengan sasaran kepuasan pelanggan.

Tugas dan tanggung jawab *Chief of Store* (COS)/ kepala toko adalah mengkoordinir personil toko untuk peningkatan penjualan dari kepuasan pelanggan dengan cara⁹:

- a. Memberikan *briefing* kepada para karyawan, sekaligus melakukan pengecekan tenaga kerja, pramuniaga, dan kasir.
- b. Mengkoordinir semua aktivitas di dalam memberikan pelayanan kepada semua pelanggan yang diarahkan untuk kepuasan pelanggan dan meningkatkan jumlah pelanggan.
- c. Menyeleksi dan mengkoordinir penerimaan barang dagangan dari *supplier*.
- d. Melakukan pengecekan terhadap ketersediaan barang dagangan, mengecek daftar harga dan penetapan *display* harga, mengecek transaksi pembelian grosir.

⁹ Hasil wawancara dengan Bpk. Edi Hartanto (Olid) sebagai kepala toko di *minimarket* Murni Winong pada tanggal 25 April 2017.

- e. Melakukan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas operasional toko sehari-hari.
 - f. Berkoordinasi/ berhubungan dengan area koordinator/ departemen lain sehubungan dengan masalah/ program tertentu yang berkaitan dengan toko.
 - g. Memastikan pencegahan dan penanggulangan barang rusak dan barang hilang sesuai target yang telah ditetapkan, serta menandatangani setiap pengeluaran barang.
 - h. Memastikan penyeteroran uang hasil penjualan barang tepat jumlah dan waktunya.
 - i. Memastikan toko, gudang, dan lingkungan sekitar dalam keadaan bersih dan rapi.
 - j. Menjalin hubungan baik kepada semua karyawan di toko, hal ini dimaksudkan agar menciptakan suasana kerja yang nyaman dan menyenangkan.
2. Prosedur operasional *Assistant Chief of Store* (ACOS)/ Wakil Kepala Toko

Assistant Chief of Store (ACOS)/ wakil kepala toko adalah seseorang yang membantu *chief of store* (COS)/ kepala toko dalam melaksanakan program kerja operasional toko sehari-hari, menerima pendelegasian dari *chief of store*, akan tetapi tanggungjawab tetap pada *chief of store*.

Tugas dan tanggungjawab *Assistant Chief of Store (ACOS)*/ wakil kepala toko adalah sebagai berikut¹⁰:

- a. Memastikan semua kerja sama dengan distributor sesuai dengan petunjuk yang ada.
 - b. Mengkoordinir pemajangan (*display*) barang dagangan baik di rak-rak penjualan ataupun gudang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Mengkoordinir dan memastikan sarana promosi terpasang sesuai petunjuk.
 - d. Mengkoordinir penerimaan barang dagangan dari *suplayer* ke gudang toko.
 - e. Mengkoordinir pengeluaran barang dari gudang toko ke area penjualan.
 - f. Menerima laporan cek stok barang dari pramuniaga.
 - g. Menggantikan *chief of store* apabila sedang tidak berangkat.
 - h. Menjalin hubungan baik kepada semua karyawan di toko, hal ini dimaksudkan agar menciptakan suasana kerja yang nyaman dan menyenangkan.
3. Prosedur operasional *Crew of Store (COS)*/ Pramuniaga

Crew of Store (COS)/ Pramuniaga adalah seseorang yang membantu terlaksanakannya program operasional kerja di dalam toko sehari-hari.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bpk. Edi Hartanto (Olid) sebagai kepala toko di *minimarket* Murni Winong pada tanggal 25 April 2017.

Tugas dan tanggungjawab *Crew of Store (COS)*/ Pramuniaga adalah sebagai berikut¹¹:

- a. Membersihkan dan mempersiapkan sarana kerja yang diperlukan.
- b. Memberikan pelayanan kepada pengunjung dengan santun.
- c. Menjawab dan menerangkan setiap kali ada pertanyaan dari pengunjung.
- d. Membantu menurunkan dan pengecekan apabila barang datang dari distributor.
- e. Menata dan membenahi barang-barang di rak, serta pemenuhan dari gudang toko ke area penjualan.
- f. Melakukan pengecekan secara berkala terhadap display harga setiap produk sudah sesuai dengan yang ditetapkan.
- g. Membuat laporan cek stok barang.
- h. Melakukan pengawasan dan pencegahan agar barang tidak hilang.
- i. Memberikan informasi dan penawaran program promosi kepada pengunjung.
- j. Menjalin hubungan baik kepada semua karyawan di toko, hal ini dimaksudkan agar menciptakan suasana kerja yang nyaman dan menyenangkan

¹¹ Hasil wawancara dengan Bpk. Edi Hartanto (Olid) sebagai kepala toko di *minimarket* Murni Winong pada tanggal 25 April 2017.

4. Prosedur Operasional Kasir

Kasir adalah seseorang yang menerima uang pembayaran saat pembelian produk barang serta memberikan pengembalian uang sisa, sekaligus menyerahkan produk kepada pembeli.

Tugas dan tanggung jawab kasir adalah sebagai berikut¹²:

- a. Membersihkan dan mempersiapkan sarana kerja yang diperlukan.
- b. Memberikan pelayanan kepada pembeli dengan satun.
- c. Memasukkan data barang-barang yang dibeli konsumen ke dalam mesin hitung atau komputer.
- d. Mencermati setiap harga barang-barang yang dimasukkan ke dalam mesin hitung atau komputer.
- e. Menyampaikan total biaya yang harus dibayar oleh konsumen, sambil membungkus barang belanjaan.
- f. Mengucapkan terimakasih dan tersenyum sambil menyerahkan barang, struk belanjaan, dan uang kembalian jika konsumen tidak memberikan uang pas.
- g. Menjalin hubungan baik kepada semua karyawan di toko, hal ini dimaksudkan agar menciptakan suasana kerja yang nyaman dan menyenangkan.

¹² Hasil wawancara dengan Bpk. Edi Hartanto (Olid) sebagai kepala toko di *minimarket* Murni Winong pada tanggal 25 April 2017.

C. Pemasaran (*Marketing*)

Pemasaran barang merupakan langkah awal untuk menjual berbagai macam produk ke masyarakat luas, yaitu dengan cara memperkenalkan macam-macam produk kepada masyarakat secara luas sehingga dapat menarik konsumen untuk membeli dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Sistem pemasaran yang baik akan membuat suatu produk lebih dikenal oleh banyak masyarakat, sehingga membuat rasa ingin mencobanya.

Minimarket Murni juga melakukan strategi pemasaran untuk menjual produk-produk yang mereka tawarkan sebagaimana usaha-usaha lainnya dalam bidang yang sama. Strategi pemasarannya adalah sebagai berikut:

1. Pemberian Harga

Dalam memberikan harga barang kepada para konsumennya, minimarket Murni membedakan dalam beberapa jenis harga antara lain sebagai berikut:

- a. Harga regular, yaitu harga yang diberikan kepada para konsumen yang membeli dalam jumlah sedikit. Harga ini diterapkan dalam transaksi yang terjadi di Murni, harga ini akan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan situasi dan kondisi pasar.
- b. Harga grosir, yaitu harga yang diberikan kepada para konsumen yang membeli dalam partai besar. Harga grosir yang diberikan Murni ini merupakan harga *discount* sehingga

harganya akan jauh lebih murah jika dibandingkan harga regular.

2. Promosi

Selain pemberian harga, minimarket murni juga melakukan promosi-promisi lainnya, seperti membuat undian berhadiah bagi konsumen yang melakukan pembelian dengan minimal tertentu, hal ini dilakukan untuk menarik minat masyarakat untuk berbelanja.

D. Macam-Macam Produk yang Diperjualbelikan

Minimarket Murni sebagai salah satu pilihan tempat berbelanja selalu berusaha menyediakan barang-barang apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat. Saat ini minimarket Murni telah menyediakan macam-macam produk barang dari berbagai jenis dan merek, antara lain sebagai berikut:

1. Produk fashion: berupa pakaian untuk dewasa dan anak-anak, perlengkapan ibadah: berupa mukena, sajadah, sarung dan peci.
2. Kosmetik, tersedia berbagai macam merek, diantaranya: Wardah, Risti, Raneer, Inez, dll.
3. Aneka makanan dan minuman kebutuhan pokok : beras, gula, minyak goreng, dan lain-lain.
4. Perlengkapan bayi, barang yang tersedia berupa perlengkapan tempat makan dan minum untuk bayi, perlengkapan mandi bayi, dan baju-baju bayi.

5. Alat-alat rumah tangga dan aksesoris.

E. Managemen Penetapan Harga di Minimarket Murni

Sebelum konsumen membeli barang, konsumen bisa melihat *display* harga barang disetiap rak terlebih dahulu. Harga yang ditetapkan oleh Murni disesuaikan dengan kualitas produk. Di Murni Winong Pati harga ditetapkan berdasarkan harga asli setiap produk dari *suplayer* ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati oleh Murni ditambah dengan biaya lain-lain, dari akumulasi tersebut akan menjadi harga *display* di rak yang akan dipasang oleh pramuniaga¹³. Harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan keadaan pasar. Pergantian *display* harga yang terjadi di minimarket Murni tidak terjadi setiap hari (skala kecil), pergantian harga terjadi dalam waktu satu atau dua minggu sekali (skala besar)¹⁴.

Kepala toko Murni menuturkan alasan kenapa tidak menetapkan harga pas, adalah sebagai salah satu trik atau strategi

¹³ Hasil wawancara dengan Bpk. Edi Hartanto (Olid) sebagai kepala toko di minimarket Murni Winong pada tanggal 25 April 2017. Penetapan harga secara rinci tidak dijelaskan, dikarenakan merupakan rahasia dari Manajemen Murni dikhawatirkan akan menjadi informasi umum.

¹⁴ Pergantian harga yang terdapat *display* rak akan diganti jika memang ada perubahan harga dari *suplayer* untuk jenis produk yang sama, atau akan diganti jika Murni mengadakan promo, hal ini akan dilakukan jika semisal minatkonsumen untuk membeli produk tersebut rendah, sehingga dengan adanya promo harga yang diberikan Murni diharapkan menarik minat konsumen untuk membeli.

untuk menarik konsumen untuk membeli barang. Pak Edi mencontohkan ketika harga suatu produk akan ditetapkan harganya Rp. 5.000,- maka Murni akan menjadikan *display* harga di rak Rp. 4.950,-, ketika seseorang sedang berbelanja yang dilihat adalah harganya, maka biasanya orang kebanyakan akan melihat angka pertama pada harga suatu barang. Menurut Pak Edi pandangan orang dianggap akan cenderung lebih tertarik untuk membeli barang dengan harga Rp. 4.950,- jika dibandingkan dengan harga Rp. 5.000,-¹⁵.

Minimarket Murni sebagai usaha ritel yang berada di tengah masyarakat dengan keadaan tingkat pendapatan konsumen yang tidak bisa diprediksi secara pasti, maka dalam mekanisme penetapan harga sangat disesuaikan dengan kualitas komoditas setiap barang atau produk, harga yang telah ditetapkan itu masuk dalam harga normal dan umum sehingga masyarakat sebagai konsumen bisa menjangkaunya.

F. Praktek Pembulatan Harga di Minimarket Murni

Masyarakat sekarang ini sebagian lebih memilih untuk berbelanja di toko-toko modern, seperti minimarket yang keberadaannya hampir merata ada disetiap pusat kota bahkan di kecamatan. Ada banyak alasan kenapa sebagian masyarakat

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bpk. Edi Hartanto (Olid) sebagai kepala toko di minimarket Murni Winong pada tanggal 25 April 2017.

cenderung memilih berbelanja di minimarket, pertama adalah penawaran produk lebih lengkap dan banyak hanya dalam satu tempat, hal ini tentu memudahkan konsumen tidak perlu repot berpindah dari satu toko ke toko lain, kemudian fasilitas yang nyaman, dan pelayanan yang ramah karena pramuniaga siap membantu bila konsumen kesulitan mencari dan membawa barang bawaan, bahkan saat konsumen baru masuk untuk berbelanja pramuniaga akan menyapa terlebih dahulu dan mengucapkan terimakasih setelahnya, kesan modern yang ditampilkan minimarket juga menjadi pertimbangan masyarakat untuk berbelanja kesana, sehingga banyak masyarakat yang berfikir bahwa berbelanja di minimarket terkesan lebih bonafit. Jadi, dari sini bisa dilihat bahwa pelayanan yang lebih dan fasilitas yang ekstra dari sebuah minimarket akhirnya sanggup menarik minat masyarakat untuk masuk dan berbelanja.

Akan tetapi dengan memilih berbelanja ke minimarket berarti masyarakat harus membayar sedikit lebih mahal dari pada harga di pasar tradisional. Harga barang di minimarket terkadang memang sedikit lebih mahal, namun hal tersebut seimbang dengan fasilitas dan pelayanan yang diberikan. Kenyataannya harga mahal tidak menjadi penghalang, karena banyak masyarakat sekarang ini yang lebih mengutamakan fasilitas dan kenyamanan dari pada harga.

Minimarket seakan telah menjadi daya tarik yang kuat ditengah masyarakat sekarang ini. Hal ini tentunya mendatangkan banyak

keuntungan bagi para pemilik dan pengelola minimarket, namun bukan berarti dalam menjalankan usahanya ini mereka tidak menemukan kendala. Berbagai persoalan harus dihadapi oleh pengelola, mulai dari masalah persaingan usaha yang semakin ketat, dan juga masalah penyediaan uang kembalian. Ketersediaan uang receh atau uang koin memang menjadi masalah yang klasik bagi para pedagang, keberadaannya seolah kian langka dan sulit ditemukan, dan menyebabkan pedagang ritel kesulitan disaat menyediakan uang receh atau uang koin untuk diberikan kepada konsumen yang memiliki sisa kembalian.

Hal ini memaksa para pedagang ritel khususnya pengelola swalayan dan minimarket melakukan praktek pembulatan harga sisa pembayaran merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang kasir yaitu membulatkan kembalian sisa pembayaran terhadap nominal kecil yang dilakukan tanpa meminta persetujuan atau pun konfirmasi kepada pembeli. Dengan melakukan pembulatan harga dari sisa uang kembalian pengelola minimarket akan sedikit memudahkan dalam mengembalikan uang sisa kembalian konsumen. Praktek pembulatan harga seperti ini juga terjadi di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati.

Menurut Bapak Edi atau akrab di sapa Pak Olid memaparkan bahwa di minimarket Murni sekarang ini juga melakukan hal yang sama sebagaimana dilakukan oleh minimarket lain. Hal ini dilakukan dengan terpaksa karena sebagian uang receh atau uang koin

keberadaannya semakin langka, seperti uang koin pecahaan Rp. 50,- yang sekarang sangat sulit sekali ditemukan dan didapatkan. Dalam menghadapi kelangkaan pecahaan kecil ini, minimarket Murni telah melakukan berbagai macam usaha untuk bisa mendapatkan uang pecahan kecil, antara lain melakukan penukaran di bank, menerima penukaran dari tukang parkir, dan juga memperoleh penukaran dari penukaran dari pengelola kotak amal¹⁶. *Display* harga yang tertera di rak memang diturunkan Rp. 50,- atau Rp. 100,- dari harga awal yang telah disepakati oleh manajemen Murni, hal ini bertujuan untuk menarik konsumen agar membeli.

Meskipun telah melakukan berbagai macam usaha untuk mendapatkan pecahan uang receh, hal ini tidak selalu mencukupi kebutuhan akan pecahan uang receh di Murni. Dalam melakukan pembulatan harga dari sisa uang kembalian, minimarket Murni hanya membulatkan harga dari uang sisa kembalian konsumen yang mempunyai nominal Rp. 50,-, dan Rp. 100,- misalnya konsumen hanya membeli satu produk dengan harga Rp. 4.150,- maka kasir akan meminta kepada konsumen untuk membayar Rp. 4.200,-. Dalam hal ini memang kasir tidak pernah melakukan konfirmasi kepada konsumen, karena berfikir bahwa konsumen memaklumi pembulatan harga tersebut¹⁷.

¹⁶Hasil wawancara dengan Bpk. Edi Hartanto (Olid) sebagai kepala toko di minimarket Murni Winong pada tanggal 25 April 2017.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Tutut Artika sebagai kasir di minimarket Murni Winong pada tanggal 25 April 2017.

Salah satu contohnya dialami oleh Ibu Very saat berbelanja di Murni, ia membayar total belanjaan sebesar Rp. 140.950,- kemudian ia membayar dengan uang Rp. 200.000,- kepada kasir, namun Ibu Very hanya menerima uang kembalian dari kasir sebesar Rp. 59.000,-, padahal seharusnya uang kembalian Ibu Very yang tertera pada struk adalah sejumlah Rp. 59.050,-. Ibu Very mengatakan bahwa hal ini memang sering terjadi dan menganggap hal tersebut tidak apa-apa. Ia menganggap bahwa nilai yang dibulatkan oleh kasir memang kecil nilainya. Ibu Very juga menuturkan seharusnya memang harus ada konfirmasi dari kasir terkait pembulatan tersebut¹⁸.

Sama halnya dengan Ibu Very, Ibu Sri Wahyuni yang merupakan pelanggan di Murni mengatakan bahwa pembulatan harga dari sisa uang kembalian yang dilakukan Murni masih dalam batas wajar dan tidak sampai menimbulkan kerugian kepada konsumen¹⁹.

Sebagian dari masyarakat yang menjadi konsumen di Murni memang menganggap bahwa praktek pembulatan harga dari sisa uang kembalian yang dilakukan oleh kasir masih dalam batas wajar karena tidak menimbulkan kerugian yang besar. Akan tetapi, masih ada sebagian dari konsumen yang merasa kurang puas akan hal tersebut. Hal ini disampaikan oleh Ibu Siti yang sudah menjadi pelanggan di Murni selama kurang lebih dua tahun, Ibu Siti

¹⁸ Hasil wawancara dengan saudara Rukma seorang konsumen di Minimarket Murni Winong pada tanggal 12 Mei 2017.

¹⁹ Wawancara konsumen dengan Ibu Yuni seorang konsumen di minimarket Murni Winong pada tanggal 12 Mei 2017.

mengatakan harga di Murni relatif lebih murah jika dibandingkan dengan minimarket lainnya yang ada di Winong, terkait dengan pembulatan harga dari sisa uang kembalian yang dilakukan oleh Murni terkadang beliau merasa kurang *srek* saat uang kembaliannya dibulatkan oleh kasir. Beliau menilai sudah seharusnya Murni memberikan uang kembalian sesuai yang tertera pada struk. saat transaksi pembayaran total yang harus dibayar oleh Bu Siti sebesar Rp. 62.450,-, saat itu Bu Siti membayar dengan uang Rp. 100.000,- dengan kembalian sebesar Rp. 37.550, akan tetapi Bu Siti hanya menerima kembali sebesar Rp. 37. 500,- saja²⁰.

Ibu Sundari menuturkan hal yang sama, alangkan lebih baik jika uang kembalian itu dikembalian seluruhnya, tidak usah digenapkan (dibulatkan). Beliau mengatakan jika sebaiknya harga dibuat pas semua tidak perlu ada *punjulane*²¹.

Pada saat melakukan praktek pembulatan harga dari sisa uang kembali kasir hendaknya juga melakukan konfirmasi kepada konsumen. Hal ini dianggap sepele oleh kasir, Seberapa pun kecil nilai uang kembalian konsumen wajib untuk diberikan karena itu adalah hak mereka.

Sekarang ini jika dilihat dan diamati praktek pembulatan harga dari sisa uang kembalian telah menjadi suatu kebiasaan yang umum

²⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Siti seorang konsumen di minimarket Murni Winong pada tanggal 12 Mei 2017.

²¹ Hasil wawancara dengan Ibu Sundari seorang konsumen di minimarket Murni Winong pada tanggal 12 Mei 2017.

dilakukan di Supermaket, swalayan, minimarket, dan toko-toko. Kiranya praktek pembulatan harga dari sisa uang kembalian ini tidak menjadi kebiasaan yang terus menerus dan seolah *lumrah* dilakukan. Meskipun sebagian besar masyarakat yang menjadi konsumen telah menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar terjadi, akan tetapi masih ada juga sebagian dari masyarakat yang merasa kurang puas dan tidak setuju jika praktek pembulatan harga dilakukan. Hal ini tentu tetap harus dijadikan bahan pertimbangan oleh pengusaha ritel, khususnya minimarket Murni agar seminim mungkin menghindari praktek pembulatan harga dari sisa uang kembalian milik konsumen.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBULATAN HARGA DI MINIMARKET MURNI KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI

A. Analisis Praktek Pengembalian Nominal Kecil dalam Jual Beli di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati

Jual beli di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati merupakan jual beli dengan cara calon pembeli memilih barang dimana disetiap barang sudah tertera harganya, kemudian pembeli membawa barang yang diinginkan ke kasir untuk memperoleh total harga barang yang harus dibayar. Saat transaksi pembayaran apabila pembeli melakukan pembayaran dengan uang lebih dari total harga barang yang harus dibayar dan terdapat kembalian, dimana kembalian tersebut terdapat nominal kecil atau receh seperti nominal Rp. 50 dan Rp. 100,-, maka akan langsung dibulatkan kasir dan dilakukan tanpa meminta persetujuan atau pun menginformasikan kepada pembeli. Jadi pembulatan harga yang terjadi di minimarket Murni merupakan suatu perbuatan dimana kasir melakukan pembulatan harga terhadap barang yang dibeli oleh konsumen, yang mana pembeli tidak mendapatkan kembalian sebagaimana mestinya sesuai dengan yang tertera pada struk. Pembulatan harga ini dilakukan sepihak oleh kasir tanpa meminta persetujuan atau pun memberikan informasi kepada pembeli terkait pembulatan yang dilakukan.

Pengelola minimarket Murni tidak memberi arahan kepada kasir untuk meminta persetujuan atau memberikan informasi saat akan melakukan pembulatan harga pada saat transaksi pembayaran. Senagaimana yang terjadi ketika pembeli melakukan transaksi pembayaran dengan uang Rp. 200.000,- untuk total belanjaan adalah sebesar Rp.140. 950,-, dimana seharusnya menerima kembalian Rp. 59.750,-, disini pembeli hanya menerima kembalian sebesar Rp. 59.050,-. Kemudian ketika pembeli melakukan transaksi pembayaran dengan total belanjaan sebesar Rp. 11.900,- dan pembeli membayar dengan uang Rp. 15.000,- pembeli hanya menerima kembalian sebesar Rp. 3.000,- saja pada seharusnya pembeli menerima kembalian Rp. 3.100,-. Hal ini terjadi hampir setiap hari dan dilakukan oleh kasir jika tidak ada pecahan uang receh atau koin.

Dalam hukum Islam, akad jual beli yang terjadi di minimarket Murni Winong disebut dengan *bai al-mu'âthâh*. Jual beli *mu'âthâh* merupakan transaksi jual beli yang tidak disertai dengan ucapan *ijab* dan *qabul*, serta dalam transaksi jual beli *mu'âthâh* ini tidak dijumpai adanya proses tawar-menawar. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli *mu'âthâh* hukumnya adalah sah, karena hal tersebut telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat. Unsur suka sama suka (*an-taradhi*) merupakan unsur penting dalam jual beli *mu'âthâh*. Ulama Hanafi, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa jual beli *mu'âthâh* adalah sah atau

boleh jika sudah menjadi suatu kebiasaan di masyarakat secara luas dan adanya kerelaan, serta menggambarkan keinginan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Adapun rukun dan syarat jual beli *mu'âthâh* ini sama persis sebagaimana jual beli yang terjadi pada umumnya, yaitu:

1. Orang yang berakad atau *al-muta'aqaid* (penjual dan pembeli)
2. *Shighat* (*ijab* dan *qabul*)
3. Objek barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaihi*)
4. Adanya nilai tukar pengganti barang (uang)

Jika dilihat dari rukun jual beli *mu'âthâh*, proses transaksi jual beli yang terjadi di minimarket Murni boleh dilakukan karena terpenuhinya rukun dari jual beli sebagaimana umumnya, dengan indikator minimarket Murni (penjual) dan pembeli sebagai *aqid*, ucapan *shighat* terwujud dalam tindakan saling mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh kasir (penjual), barang dagangan yang berada di minimarket Murni sebagai objek yang diakadkan (*ma'qud alaihi*), kemudian adanya nilai tukar barang atau uang yang diserahkan pembeli kepada kasir (penjual).

Selanjutnya, syarat-syarat jual beli *mu'âthâh* juga serupa dengan jual beli yang terjadi pada umumnya, meliputi:

1. Syarat-syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Pelaksanaan proses transaksi yang terjadi di minimarket Murni, terdapat syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang

melakukan akad, antara lain *baligh* dan berakal sehat, jika dilihat berdasarkan dari syarat tersebut maka jika jual beli dilakukan oleh orang dibawah umur dan orang yang tidak sehat pikirannya (gila) maka dianggap tidak sah. Jika dilihat proses transaksi di minimarket Murni pihak yang berakad adalah orang yang telah dewasa dan berakal sehat, dimana pegawai yang ditetapkan sebagai kasir tentu telah dewasa dan berpikiran sehat. Para pembeli pun orang yang telah dewasa dan berakal sehat, jika ada pembeli adalah seorang anak kecil yang dikatakan belum dewasa, akan tetapi berakal sehat dan anak kecil biasanya telah *mumayiz* atau bisa membedakan yang baik dan buruk.

Syarat yang selanjutnya adalah kedua belah pihak yang bertransaksi melakukan akad atas dasar kehendak sendiri. Setiap pembeli yang datang ke minimarket Murni adalah karena kehendak sendiri, mereka membeli barang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi bisa dipastikan saat transaksi terjadi tidak ada paksaan dari pihak mana pun.

2. Syarat-syarat terkait *shighat* (*ijab* dan *qabul*)

Syarat yang berkaitan dengan *shihgat* atau *ijab* dan *qabul* jika dilihat berdasarkan jual beli, antara lain:

- a) masing-masing saling bersambung dengan yang lain dalam satu majelis tanpa ada pemisah.

- b) *Ijab* sesuai dengan *qabul* dalam menunjukan apa yang wajib diridhai oleh kedua pihak, yaitu barang yang dijual dan penukar.
- c) *Ijab* dan *qabul* menggunakan lafazh lampau (*madhi*) atau menggunakan lafazh *mudhari* yang dimaksudkan untuk masa sekarang.

Jika dilihat berdasarkan syarat *shighat* jual beli di atas bisa dikatakan transaksi jual beli yang terjadi di minimarket Murni Winong tidak terdapat syarat *shighat* yang demikian. Transaksi jual beli yang terjadi minimarket Murni adalah jual beli *mu'âthâh*, dimana dalam jual beli *mu'âthâh* ini tidak terdapat lafazh *shighat* atau *ijab* dan *qabul* yang diucapkan. Ucapan *shighat* atau *ijab* dan *qabul* dilakukan dengan sikap dari kedua pihak, yaitu sikap saling mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh kasir (penjual). Ucapan *ijab* dan *qabul* tidak harus diucapkan meskipun bisa saja diucapkan oleh salah satu pihak. Diucapkan atau pun tidak diucapkannya *shighat* tidak akan membuat batal transaksi jual beli *mu'âthâh* ini, karena unsur utama jual beli *mu'âthâh* adalah unsur suka sama suka (*an-taradhin*).

3. Syarat objek atau barang yang dijual (*Ma'qud'alaih*)

- a) Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad

Syarat yang pertama terhadap objek atau barang yang dijual adalah ada dan dapat diketahui ketika akad. Di minimarket Murni semua barang yang dijual sudah ada dan dapat diketahui secara jelas jenis, merek, dan harganya karena sudah tertata rapi disetiap rak dan terdapat keterangan yang mengikuti setiap barang. Jadi pembeli bisa melihat dan memilih secara langsung barang yang akan dibeli dan bisa langsung membawanya pulang ketika telah melakukan proses transaksi pembayaran di kasir.

- b) Benda yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga

Syarat yang selajutnya terkait dengan objek atau barang yang dijual adalah barang yang berharga, bisa diartikan bahwa barang berharga yang dimaksud dikiasikan dengan barang kebutuhan, artinya setiap barang yang dijual di minimarket Murni adalah barang berharga, karena barang-barang tersebut adalah barang kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat kebanyakan.

- c) Benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual

Sudah bisa dipastikan bahwa setiap barang yang terdapat disetiap rak adalah barang milik minimarket Murni Winong yang sebelumnya minimarket Murni telah melakukan proses transaksi dengan *suplayer*, sehingga tidak perlu adanya kekhawatiran bagi pembeli untuk membeli.

d) Benda yang dijual dapat diserahkan terimakan pada waktu akad

Setelah pembeli memilih barang sesuai dengan kebutuhannya, pembeli akan melakukan proses transaksi pembayaran, pembeli menyerahkan pengganti barang berupa uang kepada kasir, dan kasir menerima uang dari pembeli serta menyerahkan barang kepada pembeli pada saat itu juga, jadi pada saat akad pembeli sudah dapat menerima barang.

4. Syarat-syarat nilai tukar barang atau pengganti barang

Syarat nilai tukar atau pengganti barang dalam jual beli jika dilihat pada zaman sekarang adalah uang. Sekarang ini setiap proses transaksi jual beli menjadikan uang sebagai nilai tukar atau pengganti barang. Sama halnya di minimarket Murni menjadikan uang sebagai nilai tukar atau pengganti barang.

Terkait dengan nilai syarat nilai tukar ini jumhur ulama membedakan *at-tsaman* dan *al-si'r*. *at-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah masyarakat secara aktual, sementara *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Maka harga yang dipakai oleh para pedagang adalah *at-tsaman*.

Di minimarket Murni sudah jelas bahwa akad yang terjadi adalah akad jual beli *mu'âthâh*, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa jual beli *mu'âthâh* ini tidak terdapat ucapan *shighat* atau ucapan *ijab* dan *qabul* dari pihak yang bertransaksi. Salah

satu dari rukun akad dalam jual beli adalah *shighat* akad. *Shighat* akad adalah bentuk ungkapan dari *ijab* dan *qabul*. Para ulama sepakat landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban diantara mereka, yang oleh para ulama disebut *shighat* akad. Dalam *shighat* akad disyariatkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh syara'. Cara tersebut adalah bahwa akad harus menggunakan lafadz yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar-menukar kepemilikan dalam harta, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.

Perwujudan *ijab* dan *qobul* dalam jual beli *mu'âthâh* tidak diucapkan, tapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. *Shighat* akad dalam jual beli memang sudah terwujud dalam tindakan antara penjual dan pembeli, namun saat melakukan praktek pembulatan harga dari sisa uang kembalian tidak disampaikan, dimana kasir seharusnya memberi tahukan atau menginformasikan kepada konsumen bahwa harga barang telah dibulatkan.

Terkait dengan praktek pembulatan harga ini sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur yaitu, mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif

Jasa Yang Diperdagangkan pada pasal 6 ayat (3), yaitu “*Dalam hal Harga Barang dan/atau Tarif Jasa memuat pecahan nominal Rupiah yang tidak beredar, Pelaku Usaha dapat membulatkan Harga Barang dan/atau Tarif Jasa dengan memperhatikan nominal Rupiah yang beredar*”¹. Pada ayat (3) telah dijelaskan bahwa pelaku usaha dapat melakukan pembulatan harga terhadap pecahan nominal yang tidak beredar. Jika dianalisis dengan peraturan tersebut terkait pembulatan harga yang dilakukan oleh minimarket Murni tentu telah menyalahi aturan tersebut karena pembulatan yang dilakukan terhadap pecahan Rp. 100,- dan Rp. 50,-. Dimana saat ini pecahan tersebut masih bisa dijumpai hingga saat ini, meskipun terkadang pecahan tersebut sulit untuk mendapatkannya.

Kemudian pada peraturan yang sama ayat selanjutnya, yaitu ayat (4) dinyatakan bahwa, “*Pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinformasikan kepada Konsumen pada saat transaksi pembayaran*”². Jadi ketika kasir *minimarket* Murni tetap melakukan pembulatan berdasarkan pada perturan tersebut, maka kasir harus menginformasikannya kepada konsumen pada saat transaksi pembayaran. Hal inilah yang acap kali dilupakan oleh kasir, kasir tidak menginformasikan atau meminta persetujuan kepada konsumen,

¹Pasal 6 Ayat (3) Permendag RI No. 35 tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan, ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 29 Juli 2013.

² Pasal 6 Ayat (4) Permendag RI No. 35 tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan, ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 29 Juli 2013.

karena seberapa pun kecil nilai nominal sisa kembalian konsumen tetaplah hak konsumen yang wajib untuk dikembalikan, jika terpaksa harus dibulatkan dengan alasan sebagaimana dijabarkan pada bab 3 maka kasir harus meminta izin dari konsumen atau pembeli pada saat transaksi pembayaran. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada keberatan atau ketidak relaan disalah satu pihak.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tidak menjelaskan sanksi administratif apa yang akan diterima oleh pelaku usaha yang melanggar ketentuan pada pasal 6 ayat (3) dan (4).

Praktek pembulatan harga dari sisa uang kembalian yang dilakukan secara sepihak dan tidak disampaikan atau diinformasikan oleh kasir menimbulkan ketidak relaan dari sebagian konsumen atau pembeli yang menghendaki sisa uang kembalian mereka dikembalikan dan tidak dibulatkan, karena hal ini berkaitan dengan hak orang lain. Dalam hal pembulatan harga tanpa menginformasikan pada konsumen adalah melanggar hak konsumen untuk mendapatkan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 huruf (c), yaitu *“hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”*³. Maka sudah seharusnya pengelola *minimarket* Murni memberi arahan kepada para kasir agar meminta persetujuan atau pun

³ Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada Tanggal 20 April 1999.

menginformasikan kepada konsumen saat melakukan pembulatan harga pada saat transaksi pembayaran.

Meminta persetujuan atau menginformasikan kepada pembeli saat melakukan pembulatan harga dari sisa uang kembalian dengan memperhatikan hak-hak konsumen yang diatur dalam pasal 4 (UUPK), tentu hal ini harus menjadi pertimbangan para pelaku usaha ritel untuk tidak asal melakukan pembulatan harga begitu saja. Para pelaku usaha ritel tentu harus memberikan pengarahannya kepada kasir agar meminta persetujuan atau menginformasikan kepada pembeli terkait pembulatan harga.

Fenomena yang telah dipaparkan di atas secara tidak langsung menerangkan bahwa proses jual beli *mu'âthâh* yang terdapat di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati secara umum tidak menimbulkan permasalahan, akan tetapi selama dalam praktek pembulatan harga dari sisa uang kembalian diinformasikan kepada konsumen atau pembeli sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomer 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan. Hal ini agar tidak melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adanya keterbukaan antara penjual dengan pembeli mengenai adanya pembulatan harga dari sisa uang kembalian ini jika dilakukan niscaya pembeli akan dapat menerima dengan lapang dada. Akan

tetapi alangkah baiknya jika diawal akad dijelaskan terlebih dahulu jika ada pembulatan harga. Jika hal tersebut dilaksanakan dengan baik maka diakhir akad nanti tidak akan terjadi kekecewaan bagi para pembeli, agar unsur kerelaan itu tetap melekat dan menyertai dalam transaksi jual beli *mu'âthâh* di minimarket Murni.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembulatan Harga di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati

Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi *madharat* kepada orang lain. Oleh karena itu melakukan hukum tukar menukar keperluan antara anggota masyarakat adalah jalan yang adil⁴.

Jual beli dalam Islam berdasarkan kesepakatan jumur ulama merupakan kegiatan yang di dalamnya terkandung beberapa rukun, yaitu pihak yang berakad (*aqid*), *shighat ijab* dan *qabul*, objek yang diakadkan (*ma'qud alaiih*), dan adanya nilai tukar pengganti barang. Praktek jual beli *mu'âthâh* di minimarket Murni Winong kota Pati telah memenuhi rukun tersebut, dengan indikator minimarket Murni (penjual) dan pembeli sebagai *aqid*, ucapan *shighat* terwujud dalam tindakan saling mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang

⁴ Nadzar Bakry, *Problematisasi Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hal. 57.

dan menyerahkan barang oleh kasir (penjual), barang dagangan yang berada di minimarket Murni sebagai objek yang diakadkan (*ma'qud alaih*), kemudian adanya nilai tukar barang atau uang yang diserahkan pembeli kepada kasir (penjual).

Pada bab tiga telah penulis paparkan bagaimana praktek pembulatan harga yang terjadi di minimarket Murni Winong Pati disebabkan oleh beberapa faktor yang memang menjadi alasan praktek pembulatan harga tersebut. Faktor yang mendorong dilakukannya praktek pembulatan harga dari sisa uang kembalian adalah sulitnya mendapatkan pecahan uang receh atau uang koin yang sekarang ini peredarannya semakin berkurang sehingga lumayan sulit untuk didapatkan, akan tetapi penetapan harga juga sengaja diturunkan agar menarik pembeli, artinya minimarket Murni pada awalnya telah menetapkan harga pas namun karena ada tujuan untuk menarik pembeli harga pas tersebut diturunkan Rp. 50,- atau Rp. 100,- sehingga *display* harga terdapat nominal kecil. Pembulatan menjadi masalah klasik yang dihadapi hampir seluruh pelaku pengusaha ritel, termasuk di minimarket Murni Winong Pati. Praktek ini terjadi kebijakan sepihak dimana kasirlah yang menentukan pembulatan.

Sebagaimana mengenai penjelasan jual beli *mu'âthâh* yang dalam *shighat ijab qabul* nya tidak perlu diucapkan karena sudah terwujud dalam tindakan, maka disini dapat dilihat bahwa akad dalam Islam memang tidak identik dengan sesuatu yang harus

diucapkan sebagai bukti adanya *ijab qabul*. Akad juga bisa terwujud dalam bentuk perbuatan atau yang dikenal dengan *shighat fi'lun* (akad perbuatan).

Pada aspek pembulatan harga, diamnya pembeli dan didukung dengan aksi pembayaran belum dapat dikategorikan sebagai sebuah akad kesepakatan atau pembeli telah merelakan. Dalam Islam, akad kesepakatan yang terjadi pada transaksi jual beli *mu'âthâh* di minimarket Murni adalah berupa perbuatan berdasarkan pada harga yang tertera dan bukan pada pembulatan yang dilakukan oleh kasir.

Sekilas pembulatan yang terjadi saat pembayaran dalam jual beli *mu'âthâh* di minimarket Murni Winong Pati seperti akad yang terwujud dalam *shighat fi'lun* (akad perbuatan) karena adanya perbuatan yang seolah nampak “menyetujui” dari akad yang dilakukan oleh kasir. Jadi belum tentu diamnya pembeli bukan berarti tanpa keberatan. Dari beberapa pembeli yang penulis temui, umunya mereka tidak keberatan dengan adanya pembulatan yang dilakukan kasir. Namun masih ada pembeli yang merasa kurang senang dengan adanya pembulatan harga.

Praktek pembulatan harga yang dilakukan kasir ini jika ditinjau dari pengertian *shighat* perbuatan maka bukan merupakan *shighat* perbuatan. Pada praktek pembulatan harga ini terlihat pembeli tidak membayar sesuai dengan yang tertera pada struk melainkan sesuai dengan pembulatan yang dilakukan kasir tersebut. Pada kasus ini seharusnya kasir menginformasikan

kepada pembeli terkait pembulatan yang memang harus terjadi karena tidak adanya satuan mata uang untuk mewujudkan pembayaran yang riil terhadap kembalian yang seharusnya diterima pembeli sebagaimana mestinya.

Apabila dilihat dari praktek pembulatan tersebut, pihak pembeli menjadi pihak yang dipaksa artinya mau tidak mau pembeli harus menerima dengan adanya pembulatan. Pemaksaan tersebut terkait dengan keharusan pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah harga barang yang dibeli. Alasan kemudahan dalam pembayaran yang menjadi penyebab dilakukannya pembulatan yang seharusnya tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah kemakluman. Jika uang pembulatan tersebut dimasukkan ke dalam laba atau keuntungan, maka yang terjadi adalah riba (tambahan). Meskipun demikian, minimarket Murni Winong sebagai pelaku usaha ritel tidak bisa lepas dari praktek pembulatan harga dari sisa uang kembalian.

Dalam aspek kegiatan bermuamalah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, maka hal ini sangat dilarang keras. Islam sangat menganjurkan kepada umatnya agar mencari nafkah dengan jalan yang telah dibenarkan, yaitu jalan yang halal dan baik. Dalam jual beli penjual harus memberikan takaran yang sesuai dengan permintaan dan mengembalikan uang kembalian yang sesuai, serta pembeli memberikan nilai tukar barang yang sesuai juga. Sebab tanpa adanya kesesuaian sama halnya dalam

jual beli tersebut terdapat aspek kebathilan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. an-Nisa ayat 29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَرْضَوْنَ
مِنْكُمْ... (النساء: ٢٩)

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. . .” (QS. An-Nisa’:29)*⁵.

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan memperoleh harta dengan jalan yang batil. Melalui ayat ini, Allah juga mengingatkan sebagaimana dijelaskan oleh M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul *“Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an Vol. II):*

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan (yakni memperoleh) harta (yang merupakan sarana kehidupan) kamu diantara kamu dengan jalan yang batil (yakni tidak sesuai dengan tuntutan syari’at), tetapi hendaklah kamu memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu (kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama)”*⁶.

⁵Departemen Agama RI, *AL-Qur’an Maghfirah dan Terjemahan*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006, h. 83.

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an)*, Jakarta: Lentera Hati, 2005, Vol. II, Cet. Ke-4, h. 411.

Meskipun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, akan tetapi indikator dan tanda-tanda dapat terlihat. Untuk itu sebaiknya saat melakukan praktek pembulatan harga kasir harus menginformasikan kepada konsumen pada saat transaksi pembayaran, agar unsur kerelaan itu tetap melekat dan menyertai dalam transaksi jual beli di *minimarket* Murni.

Nominal pecahan yang dibulatkan dan tidak dikembalikan menurut hukum Islam pada dasarnya tidak boleh dilakukan, karena sekecil apapun nilai nominal pecahan yang dibulatkan mempunyai nilai dan hak milik pembeli. Muamalah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syari'ah salah satunya adalah mengedepankan prinsip kerelaan. Harga barang yang dibayar adalah harga yang disepakati, artinya harga yang disepakati oleh pembeli adalah harga yang tertera pada *display* di rak barang. Pembulatan yang dilakukan kasir tanpa meminta persetujuan atau pun tidak menginformasikan kepada pembeli tentu telah melanggar prinsip dalam bermuamalah dan melebihi pada dasarnya. Berbeda ketika kasir meminta persetujuan atau pun menginformasikan kepada pembeli bahwa sisa kembalinya akan dibulatkan.

Dalam ajaran agama Islam, setiap aspek kehidupan manusia telah diatur dalam bentuk aturan-aturan khusus yang disebut sebagai syari'ah, dimana syari'ah tersebut harus dijalankan oleh setiap *mukallaf*. Akan tetapi kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh

manusia dalam memikul hukum itu berbeda-beda, sehingga perlu diadakannya jalan untuk menghindari kesulitan atau kesukaran dengan mengadakan pengecualian hukum. Secara adat kebiasaan di masyarakat yang berbelanja di minimarket nilai nominal pecahan yang dibulatkan tidak bernilai, maka dalam hal ini boleh memakai hukum umum atau kebiasaan, Oleh sebab itu lahirlah kaidah *fiqh* yang membolehkan praktek ini dilakukan, berikut adalah penjelasan kaidah yang menyatakan bahwa:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ⁷

Artinya: “Adat bisa dijadikan hukum”.

Kebiasaan pembulatan harga memang dianggap hal yang sudah menjadi kebiasaan dalam transaksi jual beli di minimarket. Kaidah *fiqh* di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya hukum Islam tidaklah kaku dalam memberikan justifikasi hukum terhadap suatu persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Hukum Islam selalu memberikan kemudahan serta tidak menyulitkan bagi umatnya untuk mealukan aktivitas atau tindakan yang baik. Hal ini kemudian menimbulkan hukum *rukshah* yang merupakan keringanan yang diberikan bagi *mukallaf* dalam keadaan-keadaan tertentu. Dasar dari kaidah tersebut yaitu terdapat pada al-Qur'an surat al-A'raf ayat 199, yaitu:

وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الاعراف: ١٩٩)

⁷ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, h. 94.

Artinya:

“dan serulah orang yang mengerjakan yang *ma'ruf* serta berpaling dari orang-orang yang bodoh.” (QS. al-A'raf: 199)⁸

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْقُولِ وَعَادٌ وَاللَّيْهَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى (رواه احمد عن ابن مسعود)

Artinya:

“Apa yang dipandang baik oleh muslim maka baik pula disisi Allah.” (HR. Ahmad dari Ibnu Mas'ud)⁹

‘*Adah* adalah suatu tindakan atau pun perbuatan dan juga perkataan yang secara terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran logis dan dilakukan secara terus-menerus. Sedangkan ‘*urf* adalah suatu perbuatan atau pun perkataan dimana jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan akal logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya¹⁰. Suatu ‘*adah* atau ‘*urf* dapat diterima jika tidak bertentangan dengan syari’at, tidak menyebabkan *kemafسادahan* dan tidak menghilangkan kemaslahatan, telah berlaku pada umumnya orang muslim, tidak berlaku dalam ibadah *mahdlah*, ‘*urf* tersebut sudah memasyarakat

⁸ Departemen Agama RI, AL-Qur'an Maghfirah dan Terjemahan, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006, h. 176.

⁹ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Muh. Syarief Sukandi, Bandung: Al-Ma'rif, 1999, h. 198.

¹⁰ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istimbath Hukum Islam (Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 141.

ketika akan ditetapkan hukumnya, dan tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas.

Tidak bisa dipungkiri bahwa praktek pembulatan harga dari sisa uang kembalian sebagaimana disebutkan di atas terjadi dimana-mana. Sebagian besar masyarakat juga telah menganggap wajar dan memaklumi hal tersebut, karena kerugian yang ditimbulkan juga tidak seberapa. Disisi lain masyarakat juga lebih menginginkan barang yang dibeli, ketimbang mengurus uang sisa kembalian yang nilai kecil. Tetapi memang tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sebagian kecil dari masyarakat merasa kurang puas dengan praktek pembulatan harga tersebut. Ketidak puasan atau ketidak relaan yang terjadi pada salah satu pihak dapat menandakan tidak adanya unsur *an-taradhi* pada salah satu pihak yang berakad. Bila dalam pembulatan harga dari sisa uang kembalian ada pembeli yang merasa kurang rela bila sebagian sisa uang kembaliannya dibulatkan, maka ia dapat memilih untuk tetap meneruskan sehingga pembeli harus rela sisa uang kembaliannya dibulatakan, atau membatalkan jual beli tersebut.

Dengan demikian, setiap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat harus disikapi dengan sudut pandang yang objektif. Kemudian harus dicari pokok permasalahan yang ada, kenapa bisa sampai terjadi demikian. Sehingga kita akan lebih berhati-hati dalam menjustifikasi hukum terhadap permasalahan yang ada, karena pada dasarnya persoalan

yang terjadi terkadang tidak selesai begitu saja yang hanya sebatas justifikasi hukum halal dan haram saja. Oleh sebab itu, praktek pembulatan harga di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati menunjukkan bahwa, menurut hukum Islam jika dikaitkan dengan kaidah *fiqh* yaitu adat bisa dijadikan hukum adalah diperbolehkan, karena hal tersebut biasa dilakukan oleh pengusaha ritel, termasuk di minimarket Murni Kec. Winong Kab. Pati. Namun, jika dilihat berdasarkan prinsip bermuamalah pembulatan harga yang dilakukan sepihak oleh kasir tidak boleh dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan menjawab rumusan masalah yang ada sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati*” sebagai berikut:

1. Praktek pembulatan harga yang dilakukan kasir harus meminta persetujuan atau pun menginformasikan kepada pembeli sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomer 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan. Hal ini agar tidak melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adanya keterbukaan antara penjual dengan pembeli mengenai adanya pembulatan harga dari sisa uang kembalian ini jika dilakukan niscaya pembeli akan dapat menerima dengan lapang dada. Akan tetapi alangkah baiknya jika diawal akad dijelaskan terlebih dahulu jika ada pembulatan harga. Jika hal tersebut dilaksanakan dengan baik maka diakhir akad nanti tidak akan terjadi kekecewaan bagi para pembeli, agar

unsur kerelaan itu tetap melekat dan menyertai dalam transaksi jual beli *mu'âthâh* di *minimarket* Murni.

2. Analisis hukum Islam menunjukkan bahwa, pembulatan harga di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip muamalah yaitu tidak adanya unsur kerelaan dari sebagian pembeli, dan pembulatan harga tersebut termasuk riba (tambahan) karena harga yang disepakati dan dibayar oleh pembeli adalah harga yang tertera pada display bukan pada harga setelah dibulatkan. Kecuali, kasir meminta persetujuan atau pun menginformasikan kepada pembeli saat melakukan pembulatan harga. Pembulatan harga yang terjadi di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati jika dikaitkan dengan kaidah *fiqh* yaitu adat bisa dijadikan hukum adalah diperbolehkan, namun, jika dilihat berdasarkan prinsip bermuamalah pembulatan harga yang dilakukan sepihak oleh kasir tidak boleh dilakukan.

B. Saran-Saran

Pihak pengelola Minimarket Murni sebaiknya menetapkan harga dengan melihat nilai nominal pecahan yang beredar sehingga praktek pembulatan harga bisa di hindari, dan tidak memasukkan pendapatan tambahan dari praktek pembulatan

harga ke dalam kas laba penjualan. Pendapatan tambahan ini sebaiknya dialokasikan untuk dana sosial.

Saat melakukan praktek pembulatan harga sebaiknya pengelola Minimarket Murni memberitahukan kepada kasir untuk meminta persetujuan dari pembeli, ataupun menginformasikan kepada pembeli terlebih dahulu sebelum melakukan pembulatan harga untuk menaggulagi kemungkinan adanya rasa bertanya-tanya dari pembeli. Hal ini dimaksudkan agar unsur kerelaan (*'antarâdin minkum*) diantara kedua belah pihak itu tetap melekat dan menyertai dalam transaksi jual beli *mu'âthâh* di minimarket Murni.

Konsumen sebaiknya tidak sungkan untuk menanyakan atau pun meminta klarifikasi dari kasir kenapa kembaliannya tidak diberikan seluruhnya. Apabila memang dibulatkan, maka konsumen juga sebaiknya menanyakan pembulatn tersebut digunakan untuk apa.

C. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah dzat Yang Maha Benar, karena Rahmat dan Hidayah-Nyalah akhirnya penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktivitas dalam penyusunan skripsi ini sebagai persyaratan gelar sarjana dalam bidang hukum ekonomi Islam. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi

ini masih jauh dari kesempurnaan, yaitu masih terdapat kelemahan dan kekurangan, baik menyangkut isi maupun bahasa tulisannya.

Segala saran, arahan dan kritik korektif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Selanjutnya hanya kepada Allah SWT, penulis Tawakal dan berdo'a dengan penuh harapan mudah-mudahan skripsi yang sederhana dan jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan kepada siapa saja. Semoga skripsi ini dapat dijadikan inspirasi dan menambah khazanah keilmuan bagi para pembacanya. *Aamiin ya rabbal'alamin.*

Daftar Pustaka

- ad-Dimasyqi, Syaikh al-Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman, *Fiqih Empat Mahzab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, 2010, Bandung: Hasyimi Press, cet. Ke- 13.
- Ad-Darimi, Imam, *Sunan Ad-Darimi*, terj. Ahmad Hotib & Fathurrahman, 2007, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ahmad, Idris, *Fiqh al-Syafi’iyah*, 1986, Jakarta: Karya Indah.
- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, terj. Muh. Syarief Sukandi, 1993, Bandung: Al-Ma’rif.
- al-Jamal, Abdul Mun’in, *al-Mausuah al-Iqtishad al-Islami*, 1980, Kairo: Dar al-Kitab al-Misri.
- al-Mishri’, Abdul Sami’, *Muqawwimat al Iqtishad al Islami*, terj. Dimyauddin Djuwaini, 2006, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- al-Munawwir, A. W., *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, 1984, Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, 2014, Jakarta: Sinar Grafika.
- an-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Ensiklopedia Hadits 4; Shahih Muslim 2*, terj. Masyhari dan Tatam Wijaya, 2012, Jakarta: Almahira, cet. Ke- 1.
- Anwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, 1998, Yogyakarta: PT. Pustaka pelajar Offset.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2006, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., 2011, Jakarta: Gema Insani, jilid 5, cet. Ke-1.

- Bakry, Nadzar, *Problematisasi Pelaksanaan Fiqh Islam*, 1994, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Maghfirah dan Terjemahan*, 2006, Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, 2007, Jakarta: Kencana.
- Djuawaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 2008, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalah*, 2010, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. Ke-1.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, 2007, Jakarta: Gaya Media Persada.
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*, 2011, Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Jurnal Al Ahkam, Nur Fathoni, *Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI*, 2005, Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam, Vol. IV / Edisi 1 / Mei / 2013.
- Marjaya, *Transaksi (Akad) Perdagangan di Swalayan Menurut Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Mozaic: Islam Nusantara, Vol. 03 No. 02 September 2015. h.68.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, 2009, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet-26.
- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam*, 2007, Jakarta: Raja Grafindo.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2009, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, edisi revisi, cet. Ke-1.

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2005, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, edisi 3.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam*, 2015, Jakarta: Rajawali Pres.
- Ruysd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid (Analisis Fiqih Para Mujtahid)*, terj. Imam Ghazali Said, dan Achmad Zaidun, 2002, Jakarta: Pustaka Imani, cet. Ke-2.
- Sahari, Sohari, dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, 2011, Bogor: Ghalia Indonesia, cet. Ke-1.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan, 2009, Jakarta: Pena Pundi Aksara, jilid 3.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an)*, 2005, Jakarta: Lentera Hati, Vol. II, Cet. Ke-4.
- Skripsi, Riska Triana, *Analisis fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus di Swalayan Surya Ponorogo)*, 2008, STAIN Ponorogo.
- Skripsi, Rizki Kila Alindi, *Praktek Pembulatan Tarif Oleh Kantor Pos Dufan Malang Terhadap Barang-Barang Ekspedisi Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah*, 2016, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Skripsi, Rosita Amalana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Premium di SPBU Ngaliyan Kota Semarang*, 2013, UIN Walisongo Semarang.
- Skripsi, Sekar Dhatu Indri Hapsari, *Uang Kembalian Dari Pelaku Usaha Yang Tidak Sesuai Dengan Hak Konsumen di SPBU Ovis Purwokerto (Tinjauan Yuridis Berdasarkan Undang-Undang*

- Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen), 2013, Universitas Jendral Soedirman Purwokerto.
- Skripsi, Yasir Sadan, Pengambilan Keuntungan Melalui Pembulatan Pada Bisnis Warung Internet Persfektif UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Persfektif Hukum Islam (Studi Kasus Net City Yogyakarta), 2012, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 2012, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, 2010, Jakarta: Rajawali Pres, edisi 1, cet. Ke-5.
- Sukandarrumudi, *Metodologi Penelitian*, 2012, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Suparni, Niniek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, 2013, Jakarta: Rieneka Cipta, cet. Ke-8.
- Suyuti, Imam Jalaluddin Abdurrohman Abu Bakar, *Al-asbāh wal-Nazāir fī qawā'id wafuru' fiqh al-Safi'iyah*, jilid 1, 2007Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Syafei, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, 2001, Bandung: Pustaka Setia.
- Zarqa, Mustafa Ahmad, *al-'Uqud al-Musammah*, 1968, Damaskus: Dar al-Kitab.
- Permendag RI No. 35 tahun 2013 tentang *Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan*, ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 29 Juli 2013.

Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Istimbath Hukum Islam (Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, 2002, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999.

www.academia.edu/11024548/UNDANG_UNDANG_TENTANG_IJIN_USAHA_PERDAGANGAN_SIUP/. Diakses pada tanggal 28 April 2017.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Surat_Izin_Usaha_Perdagangan/. Diakses pada tanggal 28 April 2017.

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Karyawan

Saat melakukan penelitian penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada karyawan yang bekerja di minimarket Murni Kec. Winong Kab. Pati, antara lain sebagai berikut:

1. Siapa nama bapak atau ibu?
2. Berapa usia bapak atau ibu?
3. Dimana alamat bapak atau ibu?
4. Apa jabatan bapak atau ibu di minimarket Murni sekarang ini?
5. Sudah berapa lama bapak atau ibu bekerja di minimarket Murni?
6. Bagaimana manajemen penetapan harga di minimarket Murni?
7. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pembulatan harga di minimarket Murni?
8. Apakah pembulatan harga sering dilakukan di minimarket Murni?
9. Kenapa saat melakukan pembulatan harga kasir tidak menginformasikan atau meminta persetujuan kepada pembeli saat transaksi pembayaran?
10. Bagaimana pendapat dan solusi bapak atau ibu terkait pembulatan harga yang terjadi di minimarket Murni?

B. Pertanyaan Konsumen

Saat melakukan penelitian penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada konsumen yang berbelanja di minimarket Murni Kec. Winong Kab. Pati, antara lain sebagai berikut:

1. Siapa nama bapak atau ibu?
2. Berapa usia bapak atau ibu?
3. Dimana alamat bapak atau ibu?
4. Seberapa sering bapak atau berbelanja di minimarket Murni?
5. Apakah selama berbelanja di minimarket Murni pernah mengalami pembulatan harga yang dilakukan kasir tanpa menginformasikan atau meminta persetujuan kepada bapak atau ibu?
6. Bagaimana tanggapan bapak atau ibu saat mengalami pembulatan harga yang dilakukan kasir tanpa menginformasikan atau meminta persetujuan kepada bapak atau ibu?

LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1.1

Wawancara dengan Bapak Edi Hartanto selaku Kepala Toko di *Minimarket* Murni Kec. Winong Kab. Pati pada tanggal 25 April 2017 Pukul 10.30 WIB.



Gambar 1.2

Wawancara dengan Tutut Harta Artika selaku kasir di *minimarket* Murni Kec, Winong Kab. Pati pada tanggal 12 Mei 2017 pukul 09.45 WIB.

LAMPIRAN 3

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Karyawan

Saat melakukan penelitian penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada karyawan di *Minimarket* Murni Kec. Winong Kab. Pati, antara lain sebagai berikut:

1. Siapa nama bapak atau ibu?
2. Berapa usia bapak atau ibu?
3. Dimana alamat bapak atau ibu tinggal?
4. Apa jabatan bapak atau ibu di *minimarket* Murni sekarang ini?
5. Sudah berapa bapak atau ibu bekerja di *minimarket* Murni?
6. Bagaimanakah manajemen penetapan harga di *minimarket* Murni?
7. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pembulatan harga di *minimarket* Murni?
8. Apakah masalah pembulatan harga sering terjadi di *minimarket* Murni?
9. Kenapa saat membulatkan harga kasir tidak pernah meminta persetujuan atau pun menginformasikan kepada konsumen?
10. Bagaimana pendapat dan solusi bapak atau ibu terkait pembulatan harga yang terjadi di *minimarket* Murni?

B. Pertanyaan Konsumen

Saat melakukan penelitian penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada konsumen di *Minimarket* Murni Kec. Winong Kab. Pati, antara lain sebagai berikut:

1. Siapa nama bapak atau ibu?
2. Berapa umur bapak atau ibu?
3. Dimana alamat tempat tinggal bapak atau ibu?
4. Apakah selama berbelanja di *minimarket* Murni pernah mengalami pembulatan harga yang dilakukan oleh kasir tanpa meminta persetujuan atau menginformasikan kepada bapak atau ibu?
5. Bagaimna tanggapan bapak atau ibu saat mengalami pembulatan harga yang dilakukan oleh kasir tanpa meminta persetujuan atau menginformasikan kepada bapak atau ibu?

LAMPIRAN 4

DAFTAR RESPONDEN

No.	NAMA	SEBAGAI	ALAMAT	UMUR
1	Edi Hartanto	Kepala Toko	Ds. Winong, Rt.03 Rw.02 Kec. Winong Kab. Pati	34 Tahun
2	Nita Kartika	Wakil Kepala Toko	Ds. Bumi Harjo, Rt.05 Rw.01 Kec. Winong Kab. Pati	29 Tahun
3	Tutut Artika	Kasir	Ds. Karang Konang, Rt. 02 Rw. 02 Kec. Winong Kab. Pati	23 Tahun
4	Very	Konsumen	Ds. Bumi Harjo, dukuh Ndawong, Rt. 03 Rw. 02 Kec. Winong Kab. Pati	27 Tahun
5	Sri Wahyuni	Konsumen	Ds. Pekalongan, Rt.01 Rw.01 Kec. Winong Kab. Pati	43 Tahun
6	Suharti	Konsumen	Ds. Pekalongan, Rt.02 Rw.01 Kec. Winong Kab. Pati	38 Tahun
7	Rukma	Konsumen	Ds. Sugihan, Rt. 03 Rw. 04 Kec.	25 Tahun

			Winong Kab. Pati	
8	Sundari	konsumen	Ds. Kebolampang, Rt.05 Rw.01 Kec. Winong Kab. Pati	31 Tahun
9	Lia	Konsumen	Ds. Winong, Rt.06 Rw.03 Kec. Winong Kab. Pati	26 Tahun
10	Dessy	Konsumen	Ds. Karang Wotan, Kec. Winong Kab. Pati	20 Tahun
11	Siti Aminah	Konsumen	Ds. Blingijati, Kec. Winong Kab. Pati	35 Tahun

LAMPIRAN 5

DAFTAR RESPONDEN

No.	NAMA	SEBAGAI	ALAMAT	USIA
1	Edi Hartanto	Kepala Toko	Ds.Winong Kec.Winong Kab.Pati	34 Tahun
2	Nita Kartika	Wakil Kepala Toko	Ds.Bumiharjo Kec.Winong Kab.Pati	31 Tahun
3	Tutut Artika	Kasir	Ds.Karang Konang Kec.Winong Kab.Pati	23 Tahun
4	Very	Konsumen	Ds.Bumiharjo Kec.Winong Kab.Pati	27 Tahun
5	Sri Wahyuni	Konsumen	Ds.Pekalongan Kec.Winong Kab.Pati	43 Tahun
6	Suharti	Konsumen	Ds.Pekalongan Kec.Winong Kab.Patu	38 Tahun
7	Rukma	Konsumen	Ds.Sugihan Kec.Winong Kab.Pati	25 Tahun

8	Sundari	Konsumen	Ds.Kebolampang Kec.Winong Kab.Pati	31 Tahun
9	Lia	Konsumen	Ds.Winong Kec.Winong Kab.Pati	26 Tahun
10	Dessy	Konsumen	Ds.Karang Wotan Kec.Pucak Wangi Kab.Pati	20 Tahun
11	Siti Aminah	Konsumen	Ds.Blingijati Kec.Winong Kab.Pati	35 Tahun

LAMPIRAN 4



"MOERNI"		
Jl. Winong – Pucakwangi KM. 02		
No.Nota: 187799	12/06/2017	14:58
User : HERNI		
=====		
TELON CAP LANG 100ML	1	24.450
VICKS VAPORUB 10G	1	7.450
SYSTEMA NANO 5G	1	4.750
TINK TOP 900.XL.C	1	20.900
KAPAS SARIAYU 50G	1	4.900

Disc.	-	0
Total Rp.	-	62.450
Bayar	-	100.000
Kembali	-	37.550

BARANG YANG SUDAH DIBELI TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA		



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35/M-DAG/PER/7/2013
TENTANG
PENCANTUMAN HARGA BARANG DAN TARIF JASA YANG DIPERDAGANGKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menentukan barang dan/atau jasa yang akan dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan, diperlukan adanya informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai harga barang dan/atau tarif jasa yang ditawarkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha;
- b. bahwa informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai harga barang dan/atau tarif jasa yang diberikan oleh pelaku usaha menjadi dasar bagi konsumen untuk mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Penyaluran Perusahaan 1934 (*Bedrijfsreglementering Ordonnantie* 1934, *Staatsblad* 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);

6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PENCANTUMAN HARGA BARANG DAN TARIF JASA YANG
DIPERDAGANGKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Harga adalah nilai barang dalam jumlah satuan atau jumlah tertentu yang dinyatakan dengan Rupiah.
2. Tarif adalah nilai jasa yang dinyatakan dengan Rupiah.
3. Rupiah adalah mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai mata uang.
4. Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

6. Konsumen adalah setiap orang pemakai Barang dan/atau Jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
8. Eceran adalah pemasaran produk meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan Barang secara langsung kepada Konsumen untuk penggunaan pribadi dan tidak untuk diperdagangkan.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang secara Eceran dan/atau Jasa kepada Konsumen wajib mencantumkan Harga Barang atau Tarif Jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pelaku Usaha Mikro.
- (3) Dalam hal diperlukan, Pelaku Usaha Mikro dapat mencantumkan Harga dan/atau Tarif dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Harga Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilekatkan/ditempelkan pada Barang atau kemasan, disertakan, dan/atau ditempatkan dekat dengan Barang serta dilengkapi jumlah satuan atau jumlah tertentu.
- (2) Dalam hal Barang yang diperdagangkan dikenakan pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, pencantuman Harga harus memuat informasi Harga Barang sudah termasuk atau belum termasuk pajak dan/atau biaya-biaya lainnya.

Pasal 4

- (1) Tarif Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilengkapi dengan informasi mengenai penghitungan Tarif Jasa yang didasarkan pada waktu, jarak, kapasitas, atau parameter lain.
- (2) Dalam hal Jasa yang diperdagangkan dikenakan pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, pencantuman Tarif harus memuat informasi Tarif Jasa sudah termasuk atau belum termasuk pajak dan/atau biaya-biaya lainnya.

Pasal 5

Dalam hal Barang dan/atau Jasa diperdagangkan secara *online* melalui media elektronik, Harga Barang dan/atau Tarif Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus diinformasikan dengan cara yang mudah diakses oleh Konsumen.

Pasal 6

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang secara Eceran dan/atau Jasa, wajib menetapkan Harga Barang dan/atau Tarif Jasa dengan Rupiah.
- (2) Penetapan Harga Barang dan/atau Tarif Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mata uang dan nominal Rupiah yang berlaku.
- (3) Dalam hal Harga Barang dan/atau Tarif Jasa memuat pecahan nominal Rupiah yang tidak beredar, Pelaku Usaha dapat membulatkan Harga Barang dan/atau Tarif Jasa dengan memperhatikan nominal Rupiah yang beredar.
- (4) Pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinformasikan kepada Konsumen pada saat transaksi pembayaran.

Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang secara Eceran dan/atau Jasa bertanggung jawab atas kebenaran Harga Barang dan/atau Tarif Jasa yang dicantumkan.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara Harga Barang atau Tarif Jasa yang dicantumkan dengan Harga atau Tarif yang dikenakan pada saat pembayaran yang berlaku adalah Harga atau Tarif yang terendah.

Pasal 8

- (1) Menteri melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan pencantuman Harga Barang dan/atau Tarif Jasa kepada Direktur Jenderal.

- (2) Direktur Jenderal dapat melaksanakan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik sendiri maupun bersama-sama dengan instansi teknis terkait dan/atau pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui konsultasi, edukasi, dan penyebaran informasi, baik kepada Pelaku Usaha maupun Konsumen.

Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang secara Eceran dan/atau Jasa yang:
 - a. tidak mencantumkan Harga Barang dan/atau Tarif Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau
 - b. tidak menetapkan Harga Barang dan/atau Tarif Jasa dengan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1),dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha di bidang perdagangan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pencabutan izin usaha di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing peringatan paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 10

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2013

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

tttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,





DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 08.850.993.0-507.000

NAMA : JUHARI



ALAMAT: OUKUH DEGAN

RT.01 RW.04 WINONG
WINONG
PATI

TERDAFTAR

05-01-2004



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PATI

SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

KECIL

Nomor : 512/11-05/PK/XI/2001.

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Nama Perusahaan | : | Toko " M U R N I ". |
| 2. Merek (milik sendiri / lisensi) | : | --- |
| 3. Alamat Kantor Perusahaan | : | Des. Winong Rt.01 Rw.03, Kec. Winong, -
Kab. Pati. |
| Nomor Telp. / Fax | : | --- |
| 4. Nama Pemilik / Penanggung Jawab | : | M u r n i. |
| 5. Alamat Pemilik / Penanggung Jawab | : | Des. Winong Rt.01 Rw.03, Kec. Winong, -
Kab. Pati. |
| Nomor Telp. / Fax | : | --- |
| 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : | Rp. 25.000.000,- |
| 7. Nilai Modal dan Kekayaan bersih | : | --- |
| Perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. | : | --- |
| 8. Kegiatan Usaha | : | Perdagangan Barang. |
| 9. Kelembagaan | : | Pedagang Pengecer. |
| 10. Bidang Usaha | : | Perdagangan Dalam Negeri. (Barang Keperluan pribadi, Kebutuhan sehari-hari, Kelontong KLU1.52322.52321.52112.52192). |
| 11. Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama | : | Pakaian jadi, Tekstil, Kebutuhan sehari-hari, Kelontong. |
| | : | --- |
| | : | --- |

SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan :

- P e r t a m a : Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku berdasarkan tempat kedudukan (domisili) Perusahaan dan berlaku diseluruh Wilayah Republik Indonesia.
- K e d u a : Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) berlaku selama usaha masih berjalan dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- K e t i g a : Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi
- K e e m p a t : Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) ini.

Dikeluarkan Di : P A T I

Pada Tanggal : 28 NOVEMBER 2001

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan

Koperasi Kabupaten Pati.



Minimarket Murni
Nomor : 512/11-05/PK/XI/2001Tgl : 11 Mei 2001
Jln. Raya Winong-Pucakwangi KM. 02 Winong Pati

SURAT KETERANGAN

Nomor: 001

Assalamualaikum Wr Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edi Hartanto

Jabatan : Kepala Toko

Menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Ambarwati

NIM : 132311058

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Universitas : UIN Walisongo Semarang

Judul skripsi : **"Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga di
Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati"**

Telah melakukan riset di *Minimarket Murni* Kecamatan Winong Kabupaten Pati dalam rangka menyusun skripsi sejak tanggal 24 April 2017 sampai 24 Mei 2017.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pati, 15 Juni 2017

Kepala Toko,



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ambarwati

Tempat, tanggal lahir : Demak, 14 Februari 1992

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat Asal : Rt. 02 Rw. 01, Ds. Winong,
Kec. Winong Kab. Pati

No. Telp. : 085741411003

Email : ambarretta14@gmail.com

Nama Orang Tua : Bapak Wartono
Ibu Karmisah

Riwayat Pendidikan

1	TK PGRI Pekalongan, Kec. Winong Kab. Pati	Tahun 1997-1998
2	SD N Mlatiharjo 2, Kec. Gajah Kab. Demak	Tahun 1998-2004
3	MTs N Winong, Kec. Winong Kab. Pati	Tahun 2004-

		2007
4	MAN 2 Kudus, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus	Tahun 2008-2011
5	Fakultas Syari'ah & Hukum, UIN Walisongo Semarang	Tahun 2013-2017

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya, semoga bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Semarang, 13 Juni 2017,

Ambarwati